

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**TERHADAP PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI DESA CIKANDANG, KECAMATAN KERSANA, KABUPATEN BREBES**

**TESIS**

**Disusun dalam Rangka Memenuhi Persyaratan**

**Program Magister Ilmu Hukum**

Disusun oleh :

**ACEP SETIAWAN, SH.**

**NIM :** **11010116410054**

Dosen Pembimbing :

**Dr. Ratna Herawati, SH.MH.**

**NIP. 198303202008122002**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2018**

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**TERHADAP PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI DESA CIKANDANG, KECAMATAN KERSANA, KABUPATEN BREBES**

Tesis

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

Program Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

ACEP SETIAWAN, S.H.

11010116410054

Pembimbing Mengetahui

Ketua Program Studi MIH

Dr. Ratna Herawati, S.H., MH. Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum.

NIP. 198303202008122002 NIP.19700202 1 99403 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN**

**Tesis ini diajukan oleh:**

**Nama : Acep Setiawan, S.H.**

**NIM : 11010116410054**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

**Judul Tesis : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6**

**TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI DESA CIKANDANG, KECAMATAN KERSANA, KABUPATEN BREBES**

**Telah Diuji dan Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji Pada Hari Kamis Tanggal 11 Januari 2018**

**Dewan Penguji:**

**Pembimbing : Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H. ( )**

**Penguji I : Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum. ( )**

**Penguji II : Dr. Lita Tyesta A.L.W., S.H., M.Hum. ( )**

**Ditetapkan di Semarang 11 Januari 2018**

**LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini saya, ACEP SETIAWAN, S.H., menyatakan bahwa Tesis dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap percepatan pembangunan di Desa Cikandang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes”, adalah hasil tulisan sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulisan aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik penulisan yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Apabila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Semarang, 11 Januari 2018   
 Yang membuat pernyataan,

**ACEPSETIAWAN, S.H.**

**11010116410054**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**MOTTO**

“Sempurna ngga ada apa-apanya di bandingkan sederhana yang apa adanya”

**PERSEMBAHAN**

Penelitian ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT dengan segala nikmat dan kelimpahan risky-Nya
2. Ibu Terkasih SO’ERAH, S.Pd sebagai orangtua yang terus selalu mendukung, dan memotivasi baik secara formil maupun materiil.
3. Ayah Tercinta SUNARTO S, S.Pd sebagai orangtua yang terus selalu mendukung, dan memotivasi baik secara formil maupun materiil.
4. Kaka Tersayang Susi Yanti, S.Si sebagai saudara kandung yang selalu mengingatkan, memotivasi, dan mendukung baik secara formil maupun materiil.

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Ilahi Robbi atas rahmatnya serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini, dengan judul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI DESA CIKANDANG, KECAMATAN KERSANA, KABUPATEN BREBES”.** Disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Strata II (S2) Magister Ilmu Hukum dengan bidang khusus Hukum Kenegaraan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis dalam penyusunan tesis ini telah berusaha sekuat tenaga agar dapat menghasilkan karya tulis yang sebaik-baiknya. Penulis sangat menyadari keterbatasan yang dimiliki sehingga tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dari kawan, kerabat dan dosen pembimbing penulis, maka penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H.Yos Johan Utama,SH.,Mhum selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. R.Benny Riyanto,SH.CN.M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Dr. Ratna Herawati,SH.,MH selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, dan masukan selama berjalannya proses penulisan hukum ini;
5. Dr. KHOLIS ROISAH, SH., MHum selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan tesis ini;
6. Kepada seluruh dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro khususnya bidang minat Hukum Kenagaraan yang telah membagi curahan ilmu pengetahuan dan pelajaran kehidupan yang berlimpah;
7. Orang tua tercinta yang telah memberi dukungan baik secara formil maupun materiil;
8. Saudara perempuan Susi Yanti yang saya sayang, yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam berjalannya penulisan hukum ini;
9. Teman-teman jurusan Magister Ilmu Hukum tahun ajaran 2016 kalian semua terlalu amat luar biasa;
10. Teman-teman terbaik selama kuliah di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Mas Rizky, Mas Dimas, Mba Amrina, Ismael Saleh, Julio Sopacua, Oscar Jago, Satyawan, Adhi, Aprista, Rahma, Sora, Edo, Novia, Heru, Vera Riandhini, dan semua yang tidak bisa disebut satu persatu;
11. Teman-teman Tim Futsal Magister Ilmu Hukum, Mas Rizky, Mas Dimas, Mas Yoga, Depari, Ismael Saleh, Julio, Haris, Dita, Robi, Mar’I, Ziki, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
12. Kosan ‘Wisma Hayomi’ sudah menjadi tempat teduh dan curahan segala ilmu saya selama 1 tahun di Semarang;
13. Buat kamu yang bakal menjadi teman hidupku, tesis ini untuk kamu.

Penulis menyadari bahwa didalam Penulisan Hukum ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun akan sangat bermanfaat dalam penyempurnaan Penulisan Hukum ini.

Akhir kata, Penulis berharap semoga Penulisan Hukum ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Semarang, 11 Januari 2018

Penulis

**ABSTRAK**

Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didalam Kabupaten. Dengan demikian undang-undang ini memberikan dasar menuju *self governing community ,*yaitu komunitas yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji hambatan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap percepatan pembangunan di Desa Cikandang, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes.

Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu melukiskan segala sesuatu yang ada dilaksanakan secara sistematis, kronologis. Perolehan data dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dari dokumen-dokumen resmi.

Latar Belakang Faktor Penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap percepatan pembangunan di Desa Cikandang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes meliputi berbagai faktor, faktor tersebut meliputi persoalan substansi hukum Undang-Undang Desa itu sendiri, peraturan tentang Undang-Undang dan dana desa yang bersifat multitafsir dan seringkali berubah, struktur hukum berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Cikandang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes, sehingga menimbulkan rasa takut bagi para perangkat desa (aparatur desa) dalam menggunakan dana desa, dan kultur hukum yang menyangkut kondisi masyarakat terhadap pengimplementasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap percepatan pembangunan di Desa Cikandang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes masyarakatnya apatis terhadap persoalan tersebut, sehingga ini yang menyebabkan implementasi Undang-Undang Desa tersebut tidak optimal.

Upaya yang ditempuh Desa Cikandang, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes untuk mengatasi hambatan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap percepatan pembangunan antara lain: 1. Meningkatkan kapasitas perangkat desa, diarahkan pada dua hal pokok yaitu: a. penguatan kapasitas dalam pemetaan sosial dan perencanaan pembangunan desa; b. penguatan kapasitas dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran desa untuk kepentingan masyarakat luas; 2. Memperkuat musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan desa.

**Kata Kunci : Implementasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa Cikandang**

***ABSTRACT***

Law Number 6 Year 2014 about Villages confirms the village as a legal community unity that has the authority to regulate and manage the interests of local communities based on local origins and customs that are recognized in the national government system and reside within the District. This law thus provides the foundation for a self governing community, a community that organizes and cares for the interests of its people according to local socio-cultural conditions. The purpose of this thesis is to know and examine the obstacles of the implementation of Law Number 6 Year 2014 about Village acceleration of development in Cikandang Village, Kersana Sub-district, Brebes District.

Approach method is normative juridical method, the specification of research in this law writing using descriptive analytical method is to describe everything that exists implemented systematically, chronologically. Acquisition of data is done by using literature study of official documents.

The background of the obstacles to the implementation of Law Number 6 Year 2014 about Village acceleration of development in Cikandang Village, Kersana Sub-district, Brebes District is caused by the human resources factor of the village apparatus (village apparatus) only up to senior high school, making obstacles in implementing of Law Number 6 Year 2014 about Village. The fear factor in the use of village funds, and external factors such as the regulation of the Village Act itself, the multi-interpretive and often multi-faceted legislation and village funding law, are obstacles to the village apparatus (village apparatus) Law Number 6 Year 2014 about Village.

The efforts taken by Cikandang Village, Kersana Sub-district, Brebes District to overcome obstacles to the implementation of Law Number 6 Year 2014 about Village to accelerate development include: 1. Improving the capacity of village apparatus, directed to two main issues, namely: a. capacity building in social mapping and village development planning; b. capacity building in managing and allocating village budgets for the benefit of the wider community; 2. Strengthening village meetings by involving the community in the village planning process.

The lack of village apparatus (village apparatus) and lack of central government attention, the fear of using village funds, is an obstacle in the implementation of Law Number 6 year 2014 about villages to accelerate development in Cikandang Village. The provision of training to improve the village apparatus (village apparatus) is of paramount importance to improve the performance of the village apparatus itself.

**Keywords: Implementation, Law Number 6 Year 2014, Cikandang Village**

**DAFTAR ISI**

HALAM JUDUL..................................................................................... i

HALAMAN PENGESAHAN................................................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN.......................................... iii

HALAMAN KEASLIAN KARYA ILMIAH………………………….. iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..................................... v

KATA PENGANTAR.............................................................................. vi

ABSTRAK................................................................................................ ix

ABSTRACT............................................................................................... x

DAFTAR ISI............................................................................................. xi

BAB I PENDAHULUAN................................................................... 1

1. Latar Belakang Masalah..................................................... 1
2. Rumusan Masalah.............................................................. 10
3. Tujuan Penelitian............................................................... 10
4. Manfaat Penelitian............................................................. 10
5. Kerangka Pemikiran........................................................... 12
6. Metode Penelitian………………………………………... 38
7. Pendekatan Masalah…………………………………. 39
8. Spesifikasi Penelitian………………………………… 39
9. Sumber dan Jenis Data……………………………….. 40
10. Teknik Pengumpulan Data…………………………… 44
11. Teknik Analisa Data………………………………….. 45
12. Orisinalitas Penelitian…………………………………… 46

BAB II TINJAUAN PUSTAKA......................................................... 50

1. Tinjauan Umum Desa………..…………........................... 50

1. Pengertian Desa…………...…........................................ 50

2. Kewenangan Desa………….…...................................... 52

3. Tujuan Pembentukan Desa…………………………….. 53

4. Manfaat dan Jenis Peraturan Desa……………………... 54

1. Pengertian Umum Pemerintahan Desa……….................... 56

1. Pengertian Pemerintahan Desa………............................ 56

2. Kewenangan dan/atau Fungsi Pemerintah Desa……….. 60

1. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014   
   tentang Desa.......................................................................... 61
2. Dana Desa…………………………………………………. 67
3. Pengertian Dana Desa………………………………….. 67
4. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa……………….. 74
5. Tinjauan Umum tentang Pembangunan Desa………………. 77
6. Pengertian Pembangunan Desa…………………………. 77

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN........................... 81

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian....................................... 81

1. Gambaran Umum Kabupaten Brebes….............................. 81

1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Brebes…………….. 81
2. Letak Geografis Kabupaten Brebes…………………… 82
3. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Brebes.. 84
4. Gambaran Umum Desa Cikandang, Kecamatan Kersana,

Kabupaten Brebes…………….......................................... 91

1. Sejarah Terbentuknya Desa Cikandang………………. 91
2. Letak dan Luas Wilayah………………………………. 92
3. Struktur Organisasi Pemerintahan dan Keadaan Penduduk Desa Cikandang……………………………………….. 92

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Faktor Penghambat Terhadap Percepatan Pembangunan Di Desa Cikandang, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes……............................................................................... 93

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Percepatan Pembangunan………………………….................................... 103

BAB IV PENUTUP..................................................................................... 106

1. Kesimpulan............................................................................... 106
2. Saran........................................................................................ 108

DAFTAR PUSTAKA

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *”Volksgemeenschappen”,* seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak usul daerah tersebut.[[1]](#footnote-1) Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan diaturnya Pasal 18, dinyatakan sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaran pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi, kabupaten serta kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Disamping itu, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, serta sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Demikian pula dalam pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi, dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.Menghadapi perkembangan keadaan baik didalam maupun diluar negeri serta persaingan global, maka dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berperan mewujudkan anggota masyarakat agar mencapai kesejahteraan. Ketatanegaraan Republik Indonesia dalam perjalanannya, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai lapisan terbawah dari struktur pemerintahan, aktivitas masyarakat didesa sudah semestinya mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didalam kabupaten, dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa undang-undang ini memberikan dasar menuju *self governing community,[[2]](#footnote-2)* yaitu komunitas yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desa) merupakan kebijakan yang baru dalam pembangunan di wilayah pedesaan. Undang-Undang Desa memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi Masyarakat Desa. Undang-Undang yang disahkan pada 15 Januari 2014 pada akhir masa jabatan Presidan Susilo Bambang Yudhoyono ini didasari pertimbangan bahwa Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis, serta dapat menciptakan kesejahteraan rakyat.

Sebagai Presiden yang baru terpilih untuk periode 2014-2019, didalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, telah mencanangkan *Nawakerja Prioritas* yang akan menjadi target utama dalam masa jabatan tahun 2014-2019. Pada *Nawakerja Prioritas* terdapat sembilan program yang hendak dicapai oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. *Pertama,* program Gerakan Desa Mandiri di 3.500 desa tahun 2014. *Kedua,* pendampingan dan penguata kapasitas kelembagaan dan aparatur desa tahun 2015. *Ketiga,* pembentukan dan pengembangan 5.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Keempat,* melakukan revitalisasi pasar desa yang ditargetkan dilakukan di 5.000 Desa/kawasan pedesaan. *Kelima,* pembangunan insfrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di Desa Mandiri. *Keenam,* persiapan implementasi *penyaluran* dana desa sejumlah Rp. 1,4 Milyar untuk setiap desa secara bertahap. *Ketujuh,* penyaluran modal bagi koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah di Desa. *Kedelapan,* pembangunan proyek percontohan sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di Desa. *Kesembilan,* pembangunan Desa di Perbatasan.

Pemerintah melaksanakan pembangunan Desa sebagai upaya dalam mensejahterakan rakyat berdasarkan *Nawakerja Prioritas* tersebut. Dana yang didapatkan oleh Desa dialokasikan dalam kewenangan desa. Pelaksanaan pembangunan desa merupakan satu dari kewenangan desa. Kewenangan desa meliputi; penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan masyarakat desa. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa : penyelenggaraan kewenangan desa ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam pelaksanaan pembangunan desa pada hakikatnya merupakan proses perubahan yang harus terus menerus menuju ke arah yang lebih baik. Tujuan pembangunan desa sesuai Pasal 78 Undang-Undang Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kegiatan pembangunan nasional dengan segala ukuran keberhasilan dan dampak positif serta negatif, tidak terlepas dari pengabdian aparat pemerintah Desa. Meskipun demikian, masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat Desa yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Kenyataan ini telah membuktikan bahwa meskipun Desa memiliki dua sumberdaya penting yaitu SDM dan SDA, tetapi kesatuan masyarakat hukum tersebut tidak mampu mengubah potensi yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan guna memenuhi kebutuhannya sendiri.[[3]](#footnote-3) Keterbatasan kemampuan pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi dan peranannya menyebabkan pertumbuhan dan perubahan sosial di Desa berjalan lambat. Masyarakat Desa cenderung pasif dalam melakukan perubahan sosial dan ekonomi. Situasi ini menyebabkan masyarakat Desa semakin tergantung pada pihak luar Desa. Pertimbangan kesejarahan dan adaptasi serta antisipasi terhadap berbagai tuntutan perkembangan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadi dasar pengembangan Desa ke depan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah memberikan landasan sebagai arah pengembangan Desa di masa yang akan datang.[[4]](#footnote-4)

Terdapat dua masalah utama dalam masa transisis implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pertama adalah terkait kapasitas administrasi dan tata kelola birokrasi di Desa yang masih belum terlatih, sehingga harus diselesaikan dan segera dibereskan. *Kedua* adalah persoalan akuntabilitas pemerintah Desa dala mengelola anggaran yang cukup besar. Alasannya, untuk tataran pemerintah Kabupaten/Kota persoalan akuntabilitas belum juga terselesaikan. Dalam hal ini pemerintah ditingkatkan Kabupaten/Kota hanya bertanggungjawab secara prosedur bukan subtantif.[[5]](#footnote-5)

Transisi regulasi memungkinkan pihak Desa mempersiapkan diri dalam merancang dan menjalankan program Desa sinergi dengan regulasi yang ada. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik dan saling menunjang antara pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis.[[6]](#footnote-6) Tidak semua Desa dalam pelaksanaannya mampu untuk mengimplementasikan Undang-Undang Desa dalam pelaksanaan Pembangunan Desa dengan baik, termasuk Desa Cikandang, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes yang belum optimal dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Desa Cikandang merupakan salah satu Desa yang mengimplementasikan Undang-Undang Desa dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa muncul keraguan dari pemerintah kepada kemampuan Pemerintah Desa dalam mengambil kebijakan dalam mengelola potensi dan pembangunan agar nantinya pembangunan tersebut bersifat nyata dan bijaksana, serta dengan adanya dana APBDesa tidak membuat Kepala Desa selaku Pemerintah Desa justru berhadapan dengan aparat penegak hukum. Untuk itu Kepala Desa dan Aparatur Desa yang lain perlu untuk membuat pembukuan yang akuntabel dan transparan. Permasalahan selanjutnya apakah rancangan program pembangunan akan terwujud sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diiringi dengan adanya biaya berupa kucuran dana dari APBN. Kemudian, apakah Desa mampu mengelola Dana Sesuai dengan kebutuhan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Beberapa program yang akan dijalankan oleh Pemerintah Desa Cikandang meliputi: renovasi kantor desa, pembangunan jembatan, pengaspalan jalan desa dan pembangunan drainase air. Namun beberapa diantara program tersebut terkendala pada biaya. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di desa Cikandang pembangunannya tidak terlihat sama sekali, kantor desa yang sudah rapuh kondisinya, banyak jalan yang berlubang sehingga saat turun hujan terjadi genangan air, serta tidak berfungsinya drainase air. Tetapi sekarang berbeda setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa percepatan pembanguanannya sedikit demi sedikit mulai terlihat dari beberapa program yang telah di buat oleh pemerintah desa Cikandang.

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa ini harus melalui perencanaan, pelaksanaan, pembanginan desa harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.[[7]](#footnote-7) Atas dasar latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai **“Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Percapatan Pembangunan di Desa Cikandang, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes”.**

1. **Perumusan Masalah**
2. Mengapa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengalami hambatan dalam implementasi terhadap percepatan pembangunan di Desa Cikandang, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes?
3. Apasajakah upaya yang sudah dilakukan Desa Cikandang, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes dalam mengatasi hambatan tersebut?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap percepatan pembangunan di Desa Cikandang, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes.
6. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang sudah dilakukan Desa Cikandang, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes dalam mengatasi hambatan tersebut.
7. **Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum tata negara pada umumnya.
3. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap percepatan pembangunan di Desa Cikandang, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes.
4. Bermanfaat sebagai bahan informasi, juga untuk menambah pembendaharaan literatur atau bahan informasi ilmiah.
5. Manfaat Praktis
6. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari segi Hukum mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap percepatan pembangunan.
7. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti
8. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
9. Sebagai bahan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.
10. **Kerangka Pemikiran**

Fenomena permasalahan/problem serta isu yang berkembang di lokasi studi

Fokus : Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Percepatan Pembangunan

Perumusan Masalah :

* Mengapa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengalami hambatan dalam implementasi terhadap percepatan pembangunan di Desa Cikandang, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes?
* Apasajakah Upaya yang Sudah Dilakukan Desa Cikandang, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes dalam mengatasi hambatan tersebut?

Teori :

1. Teori Negara Hukum
2. Teori Peraturan Perundang-Undangan
3. Teori Sistem :
4. Struktur Hukum
5. Substansi Hukum
6. Budaya Hukum

Konsep:

1. Implementasi
2. Pemerintah Desa
3. Dana Desa
4. Pembangunan Desa
5. Pembangunan Infrastruktur

Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

1. **Konsep**

Konsep memberikan batasan tentang terminologi teknis dan merupakan bagian dari kerangka teori.

1. **Implementasi**

Terdapat para ahli yang mendefinisikan mengenai istilah implementasi, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Mazmanian dan Sebastiar, Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.[[8]](#footnote-8) Menurut Van Meter dan Van Hom, Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.[[9]](#footnote-9) Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan. Menurut Friedrich, Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.[[10]](#footnote-10) Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

1. **Pemerintah Desa**

Istilah pemerintah dan pemerintahan dalam masyarakat secara umum diartikan sama, dimana kedua kata tersebut diucap bergantian (pemerintah atau pemerintahan). Sebutan kedua kata atau istilah tersebut merujuk pada penguasa atau pejabat. Misalnya: mulai dari Presiden sampai tingkat Kepala Desa atau Kepala Kelurahan. Artinya, semua orang yang memegang jabatan disebutlah pemerintah atau pemerintahan, tetapi orang yang bekerja didalam lingkungan pemerintah atau pemerintahan disebut orang pemerintah(an).

Konsep pemerintahan dapat dibuat dalam arti yang sangat luas dan sempit. Artinya tugas dan wewenang pemerintahan itu dapat diperluas dan di persempit dengan membentuk organ-organ atau badan-badan dalam pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah negara.[[11]](#footnote-11)

Selanjutnya kata “desa”, yang “cikal bakalnya” diperkenalkan oleh seorang warga Belanda Mr. Herman Warner Muntinghe yang bertugas sebagai Pembantu Jendral Inggris pada tahun 1817,[[12]](#footnote-12) secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sangsekerta, yaitu “*deca*”, seperti dusun, desa, negara, negeri, negari, nagaro, negory (nagarom), yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.[[13]](#footnote-13) Dalam perspektif sosiologis, desa diberi pengertian sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergatung kepada alam. Desa yang diakui, yakni Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang disebut dengan nama-nama setempat dan desa dibentuk, yakni desa yang diakui oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang. Artinya desa dipandang sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa atau memiliki wewenang mengadakan pemerintahan sendiri.

Sedangkan pengertian pemerintahan desa dalam Pasal 1 Angka 6, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No 72 Tahun 2005 tentang Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. **Dana Desa**
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 dana desa yang dimaksud adalah dana yang berasal dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran untuk dana desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD yang di peruntukan untuk desa dilakukan secara bertahap pada bulan april 40% (persen), bulan agustus 40% (persen), dan bulan oktober 20% (persen). Penggunaannya menurut menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal yang tercantum dalam Permendes Nomor 21 Tahun 2015 lebih di prioritaskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

1. **Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang mana sumbernya berasal dari dana hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa didalam Pasal 18 menyatakan bahwa, alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah untuk kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Pengelolaan dana desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:

1. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
3. Alokasi dana desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
5. Alokasi dana desa harus dicatat di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
6. **Keuangan Desa**

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 121 ayat (1) jo ‘ Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 1 angka (1) bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.[[14]](#footnote-14) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntable, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember.[[15]](#footnote-15)

Dari pendapat diatas bahwa dalam penggunaan dana desa yang digunakan oleh pemerintah desa harus ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat. Dana desa sendiri berasal dari APBN sebagai pendapatan asli desa dan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1. **Pembangunan Desa**

Konsep pembangunan desa merupakan konsep yang sangat multidimensional, yang mengacu kepada serangkaian karakteristik dan segenap aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi maupun sosial. Menurut Todaro dalam Bryant Coralie dan White Louise (1998) pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan.[[16]](#footnote-16) Proses pembangunan nasional tentunya dimulai dari pembangunan pada kelompok masyarakat paling kecil yaitu desa, desa merupakan ujung tombak dari sukses atau tidaknya implementasi otonomi daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan seiring diterapkannya arus desentralisasi, paradigma pembangunan nasional telah mengalami perubahan, dari pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Isu strategis 2014-2019 dalam perencanaan pembangunan desa diantaranya adalah:

1. Masih rendahnya aksesbilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan;
2. Peningkatan ketahanan pangan;
3. Peningkatan iklim investasi daerah;
4. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah;
5. Kerentanan wilayah terhadap bencana alam;
6. Tingginya kemiskinan;
7. Tingginya angka pengangguran;
8. Belum maksimalnya kinerja aparatur daerah.[[17]](#footnote-17)

Dari isu-isu strategis tersebut diatas membuktikan bahwa masih banyak hambatan dalam melaksanakan pembangunan desa. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembanguan dan hasil-hasilnya, serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat yang bermukim di pedesaan.

1. **Pembangunan Infrastruktur**

Pengertian pembangunan disini menurut para ahli ada bermacam-macam, seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa diartikan berbeda-beda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Siagian memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.[[18]](#footnote-18) Sedangkan insfrastruktur berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, dan lain-lain. Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.[[19]](#footnote-19)

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintah, perekonomian, industri kegiatan sosial masyarakat dan pemerintah.

Mulai dari sisterm energi, transportasi jalan raya, bangunan-bangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah peribadatan dan jaringan air bersih, kesemuanya itu memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang handal. Agar jelas ruang lingkup pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi 3 bagian, Yaitu :[[20]](#footnote-20)

1. Pembanguan infrastruktur transportasi pedesaan guna mendukung peningkatan aksesbilitas masyarakat desa, yaitu : jalan, jembatan.
2. Pembangunan insfrastruktur yang mendukung produksi pertanian yaitu : irigasi pedesaan.
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi : penyediaan air minum, sanitasi pedesaan.

Pengertian menurut para ahli yang menyimpulkan bahwa pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan yang dilakukan secara terencana demi kepentingan masyarakat yang berada di desa, tetapi masyarakat juga berperan aktif dalam sebuah pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa.

1. **Teori**

Landasan teori merupakan landasan berfikir yang bersumber dari teori yang diperlukan sebagai tuntunan dalam memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian. Landasan teori berfungsi sebagai kerangka acuan untuk mengerahkan suatu penelitian. Pada landasan teori dapat berupa perangkat konsep, definisi dan proposisi yang menyajikan hubungan antara variabel-variabel yang menerangkan gejala dalam penelitian. Sementara teori merupakan perspektif atau sudut pandang untuk menafsirkan dan memaknai gejala-gejala dalam membangun konsep.

1. **Teori Negara Hukum Pancasila**

*A “rule of law” that lies beyond the state may concern the reach of law into the global setting. It may refer to some global law, as yet still uncertain and undefined, as a component of some governance processes that are, as a whole, outside of states’ control*.[[21]](#footnote-21) Terlepas dari penamaan Indonesia sebagai Negara hukum dengan sebutan *rechsstaat* atau *rule of law*, yang jelas secara konstitusional hasil amandemen ketiga UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (Pasal 3 ayat (3) UUD 1945. Eksistensi Indonesia sebagai Negara hukum ditandai dengan beberapa unsure pokok, seperti pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang, persamaan di depan hukum, adanya peradilan administrasi dan unsur lainnya. Hak-hak asasi manusia akan terlindungi karena dalam konsep the rule of law mengedepankan prinsip *equality before the law*, sedangkan konsep *rechtsstaat* mengedepankan prinsip *wetmatigheid*, kemudian menjadi *rechtmatigeheid*. Hukum hak asasi manusia internasional menurut Dilton Riberio mengalami beberapa hambatan secara praktis dan teori, hal ini disebabkan oleh karena hukum internasional secara tradisional mengacu pada sekelompok norma dan prinsip yang diciptakan oleh negara bagian untuk mengatur hubungan mereka satu sama lain. Seperti dalam jurnalnya dia menyatakan bahwa:[[22]](#footnote-22)

*“International law traditionally refers to a group of norms and principles created by states in order to regulate their relations with one another. However, this traditional approach has met some practical and theoretical problems, especially in international human rights law. This article argues that human rights, as a particular system that is part of the broader realm of international law, differs from the latter in one central aspect: it recognizes the human person as a central element and acknowledges its international personality. This particularity forces judges and the international community as a whole to consider the interests and rights of individuals when interpreting and applying human rights norms. In accepting individuals as bearers of rights and duties distinct from those of states, the international sphere not only recognizes the individual’s legal personality at the international level, but also acknowledges more extensively that all the particularities of the “human family” need to be important elements in the evolution and application of international law of human rights. The Inter-American Court of Human Rights seeks to recognize this multiculturalist and pluralist approach through the pro homine or pro individual interpretation.”*Indonesia yang menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat mengedepankan asas kerukunan.[[23]](#footnote-23)

Asas kerukunan dalam konsep Negara Hukum Pancasila dapat dirumuskan maknanya, baik secara positif maupun negatif. Dalam makna positif kerukunan berarti terjalinnya hubungan yang serasi dan harmonis, sedangkan dalam makna negatif berarti tidak konfrontatif, tidak saling bermusuhan, dengan makna demikian pemerintah dalam segala tingkah lakunya senantiasa berusaha menjalin hubungan yang serasi dengan rakyat.[[24]](#footnote-24) Berdasarkan asas kerukunan tersebut, tidak berarti hubungan antara pemerintah dan rakyat tidak memunculkan sengketa. Kehidupan bermasyarakat atau bernegara pasti menimbulkan sengketa dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk sengketa antara pemerintah dan rakyat. Meskipun demikian, yang dibutuhkan adalah metode atau cara penyelesaian sengketa yang tepat dan tidak menimbulkan keretakan atau ketidakharmonisan dan tidakserasian hubungan pemerintah dan rakyat dalam konteks Negara Hukum Pancasila.

Mengenai hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara, hendaknya dikembalikan kepada ide dasarnya, yaitu gotong-royong. Paham gotong-royong ini menurut Philipus M.Hadjon, telah diangkat sebagai suatu konsep politik. Hal ini dapat dilihat dari persiapan-persiapan kemerdekaan Indonesia. Bahkan dalam pidatonya tanggal 1 juni 1945, Soekarno menyatakan Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah Negara gotong-royong.[[25]](#footnote-25)

Selain paham gotong-royong dan kekeluargaan disadari sebagai asas yang melandasi hubungan pemerintah dan rakyat dalam penyelenggaraan Negara Hukum Pancasila, menurut Oemar Senoadji bahwa salah satu ciri pokok Negara Hukum Pancasila adalah jaminan kebebasan beragam (*Freedom of religion*).[[26]](#footnote-26) Ciri berikutnya dari Negara Hukum Pancasila menurut Oemar Senoadji adalah tidak ada pemisahan yang rigid dan mutlak antara agama dan negara, karena agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis, dan tidak boleh terjadi pemisahan agama dan negara, baik secara mutlak maupun secara nisbi, karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.[[27]](#footnote-27)

Negara hukum pancasila menjamin setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, menurut Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang diberikan oleh Negara kepada warga negaranya untuk mengimplementasikan kebebasan itu dalam memeluk dan beribadat menurut agamanya, tanpa khawatir terhadap ancaman dan gangguan dari pihak lain. Karakteristik Negara Hukum Pancasila yang lain, yaitu asas kekeluargaan sebagai bagian fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menguatnya asas kekeluargaan ini memberikan kesempatan atau peluang kepada rakyat banyak untuk tetap survive guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya, sejauh tidak menggangu hajat hidup orang banyak.

Disamping itu, Negara Hukum Pancasila juga mengedepankan prinsip persamaan sebagai elemen atau unsur penting dalam penyelengaraan pemerintahan. Persamaan dihadapan hukum misalnya adalah soal urgensial yang harus pula mendapat perhatian pihak penyelenggara Negara. Bahkan secara konstitusional memberikan landasan untuk lebih menghargai dan menghayati prinsip persamaan ini dalam kehidupan Negara Hukum Pancasila, antara lain dalam Pasal 28 D UUD NRI 1945:

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Prinsip persamaan tersebut secara teoritis atau praktis tidak hanya mencakup bidang politik, hukum dan sosial, tetapi juga bidang ekonomi dan kebudayaan. Penegakan prinsip persamaan ini menjadi prasyarat yang mendukung eksistensi Negara Hukum Pancasila mengaktualisasikan atau mengimplementasikan komitmennya menyejahterakan kehidupan lapisan masyarakat sebagai misi penyelenggaraan pemerintahan. Adanya peradilan yang bebas intervensi atau campur tangan pihak lain, juga termasuk unsur atau elemen yang melekat atau menjiwai karakteristik Negara Hukum Pancasila. Independensi peradilan ini secara teoritis atau praktis merupakan pilar Negara hukum yang hampir dianut oleh negara-negara di berbagai belahan dunia.

Independensi peradilan dimaksudkan sebagai tidak adanya campur tangan lembaga-lembaga diluar pengadilan, terutama kekuasaan eksekutif dan yudikatif terhadap pelaksanaan fungsi peradilan.[[28]](#footnote-28) Meskipun demikian, independensi peradilan ini bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi begitu saja, karena kekuasaan-kekuasaan diluar pengadilan memiliki potensi mencampuri pelaksanaan fungsi peradilan.[[29]](#footnote-29) Oleh karena itu, menurut Muhammad Nasrun, peradilan yang tidak independen sangat berbahaya, karena proses peradilan bisa dimanipulasi untuk mencegah pengadilan mempertanyakan legalitas tindakan-tindakan ilegal atau semena-mena oleh para pelaksana kekuasaan negara.[[30]](#footnote-30)

1. **Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Menurut Bagir Manan yang mengutip pedapat P.J.P tentang*wet inmateriele zinmelukiskan* pengertian Perundang–undangan dalam artimateril yang esensinya anatara lain sebagai berikut:[[31]](#footnote-31)

1. Peraturan perundang–undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang–undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht,written law*);
2. Peraturan perundang–undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan”yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*);
3. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang–undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gezetzgebbung*) mempunyai dua pengertian :[[32]](#footnote-32)

1. Perundang–Undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan–peraturan Negara, baik tingkat pusat maupunditingkat daerah.
2. Perundang–undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakanhasil pembentukan peraturan–peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Dalam konteks pembentukan peraturan daerah, DPRD sebagai lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah harus memperhatikan sebuah landasan hukum sebagai sesuatu hal agar peraturan daerah tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dalam masyarakat, sesuai apa yang dikatakan oleh Solon Solomon[[33]](#footnote-33)*Law, by its natural is not static, but dynamic*. Kedinamisan hukum tersebut yang harus menjadi landasan pemerintah daerah agar produk hukum yang dikeluarkan nanti dapat diterima dalam masayarakat.

Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan daerah sebagai salah satu bentuk regulasi daerah pada hakikatnya merupakan standar aturan main untuk menerapkan desentralisasi dalam penyelengaraan pemerintahan daerah,[[34]](#footnote-34) sehingga dalam pembentukannya tunduk pada asas maupun teknik dalam penyusunan perundang-undangan yang telah ditentukan. Hal yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah menyangkut tentang landasannya. Landasan yang dimaksud disini adalah pijakan, alasan atau latar belakang mengapa perundangan-undangan itu harus dibuat. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Bagir Manan terdapat 4 (empat) landasan yang digunakan dalam menyusun perundang-undangan agar menghasilkan perundang-undangan yang tangguh dan berkualitas.[[35]](#footnote-35)beberapa landasan yang harus diperhatikan sebelum menyusunya tersebut antara lain adalah:[[36]](#footnote-36)

1. Landasan filosofis

Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Hal ini disebut juga dengan cita hukum, yaitu berkaitan dengan baik dan buruk, adil atau tidak adil. Hukum hukum diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat. dalam kaitan ini, penyusunan peraturan daerah, harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam pancasila.

1. Landasan yuridis

Landasan yuridis sangat penting dalam penyusunan peraturan daerah, dalam hal ini berkaitan dengan: *Pertama*, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan daerah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap peraturan daerah harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Apabila dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang akan mengakibatkan peraturan daerah tersebut batal demi hukum, artinya peraturan daerah tersebut dianggap tidak pernah ada, begitupula dengan segala akibat hukumnya.

Secara mudah dapat dikatakan bahwa batal demi hukum disini adalah mati dengan sendirinya, tidak perlu ada suatu tindakan apapun. Namun, dalam praktek yang namanya batal demi hukum ini tidak pernah terjadi, karena peraturan daerah tersebut nyatanya tidak mati (batal) dengan sendirinya tetapi perlu ada suatu tindakan. Apabila ada suatu tindakan maka berarti dibatalka. Bukan batal demi hukum.

*Kedua*, keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan daerah. Ketidaksesuaian jenis ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan daerah tersebut. Misalnya, pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 menyatakan “segala pajak diatur dengan undang-undang”. hal ini jelas bahwa masalah pajak hanya merupakan materi muatan jenis peraturan daerah yang lain selain undang-undang. jadi jika ada masalah pajak diatur dengan keputusan menteri, maka keputusan menteri tersebut dapat dibatalkan.

*Ketiga*, keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. jika tata cara atau prosedur tidak di taati, maka peraturan daerah tersebut kemungkinan batal demi hukum dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. *Keempat*, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatanya. Sebagaicontoh misalnya peraturan menteri dalam negeri tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi.

1. Landasan sosiologis.

Landasan sosiologis adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat. kondisi ini atau kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan daerah diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif (living law). Sebagai contoh peraturan daerah harus memperhatikan struktur dan budaya masyarakat.

1. Landasan ekonomis.

Landasan ekonomis maksudnya adalah agar peraturan daerah yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang tidaklah menimbulkan beban ekonomi yang sangat tinggi sehingga mengganggu perekonomian negara secara keseluruhan.

1. Landasan politik.

Landasan politik maksudnya agar peraturan daerah yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum. Landasan politik atau yang dapat disebut dengn politik pembentukan peraturan-perundangan merupakan sendi penting dari politik hukum nasional dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang holistik dan komperhensif.[[37]](#footnote-37)

Peraturan daerah yang baik harus mempunyai sebuah asas-asas, adapun asas-asas pembentukan peraturan daerah yang baik meliputi:[[38]](#footnote-38)

1. Kejelasan tujuan

Asas ini mencakup tiga hal, yaitu mengenai ketetapan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintah, tujuan khusus peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, dan tujuan dari bagian-bagian peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.[[39]](#footnote-39)

1. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

Asas ini memberikan penegasan tentang perlunya kejelasan kewenangan organ-organ/lembaga –lembaga yang menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.[[40]](#footnote-40)

1. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

Asas ini menghendaki bahwa dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan-perundang-undangan.[[41]](#footnote-41) Pendapat lain mengatakan bahwa terdapat 5 syarat materi hukum yang perlu menjadi acuan bagi para legislator, 5 syarat tersebut adalah:[[42]](#footnote-42)

1. Materi muatan hukum harus mencerminkan perincian perwujudan kehendak dari pelaku negara sebagai pemegang kedaulatan negara.
2. Materi hukum adalah eksistensi, statistika, atau dinamika.
3. Tujuan hukum dalam setiap materi hukum adalah eksistensi ketertiban tertentu, yaitu tegaknya ketertiban tertentu pada waktu dan tempat tertentu.
4. Setiap materi hukum berfungsi esensial dalam hubungan dari atau dengan manusia dalam atau dengan negara demi tegaknya ketertiban.
5. Esensi eksistensi hukum cukup besar atau memadai.
6. Dapat dilaksanakan

Asas ini menghendaki bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupin sosiologis.[[43]](#footnote-43)

1. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Asas ini menghendaki bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[[44]](#footnote-44)

1. Kejelasan rumusan

Asas ini menghendaki bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya.[[45]](#footnote-45)

1. Keterbukaan

Asas ini menghendaki bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparansi dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.[[46]](#footnote-46)

Dalam pembentukan perundang-undangan terdapat berbagai aspek yang akan mempengaruhinya, untuk itu Prof.Tjip menuntun agar para legislator dalam proses pembuatan hukum dapat mencermati berbagai kekuatan yang ikut bermain dalam proses hukum, kesadaran tersebut dapat dipupuk dan dibangun melalui usaha secara cermat dan bersungguh-sungguh untuk memasukan secara sistematis komponen asas kedalam suatu produk hukum.[[47]](#footnote-47)

1. **Teori Sistem**

Sistem hukum terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan hukum. Sistem dapat dipahami sebagai sesuatu yang berorientasi kepada tujuan, sementara hukum diartikan sebagai norma yang digunakan untuk mengatur masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum merupakan sebuah norma yang berorientasi kepada tujuan dimana tujuan dari hukum tersebut adalah memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Lawrence M.Friedman mengatakan bahwa sistem hukum menunjang; sistem hukum meningkatkan; sistem hukum menyuguhkan cara yang mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan . Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum mempunyai tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan kultur / budaya hukum (*legal culture*).[[48]](#footnote-48)

1. **Struktur hukum**

Struktur merupakan salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Struktur sistem hukum sebagai kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Dalam komponen tersebut dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.[[49]](#footnote-49)

1. **Substansi hukum**

Substansi merupakan aturan, norma, dan pola periaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Substansi dapat dipahami juga sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum tersebut (struktur) yang berupa keputusan-keputusan ataupun aturan baru yang dikeluarkan.

**budaya hukum (*legal culture*)**

Budaya hukum merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berfikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. budaya hukum lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. dalam hal ini kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku tehadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat. semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan terciptanya budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

1. **Metode Penelitian**

Menurut Kartini Kartono, Ia mengemukakan bahwa metode penelitian adalah cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelian. Penelitian ilmiah melibatkan lebih dari sekedar pengembangan kecakapan-kecapakan teknis, tetapi memiliki suatu sasaran yeng lebih jauh yaitu menghadirkan prosedur-prosedur didalam suatu konteks yang memungkinkan penulis memilih stategi penelitian yang layak.[[50]](#footnote-50)

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan karena metodologi berfungsi menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik dan lebih lengkap, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner, memberikan pedoman untuk mengorganisasi serta mengintegrasikan pengetahuan.[[51]](#footnote-51) Berikut uraian metode penelitian yang dipilih oleh penulis :

1. **Pendekatan Masalah**

Dasar yang digunakan penelitian adalah Yuridis-Normatif yaitu mengacu pada suatu hukum yang sudah ada ketetapannya, dalam konteks ini yang dimaksud adalah implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terhadap percepatan pembangunan. Hal ini dilakukan dengan melihat sejauh mana pengetahuan tentang desa.[[52]](#footnote-52)

1. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Metode deskripstif adalah melukiskan atau menggambarkan mengenai segala sesuatu yang ada, dilaksanakan secara sistematis, kronologis berdasarkan kaidah ilmiah. Sedangkan analistis keilmuan, sedapat mungkin data yang diperoleh akan di analisis, baik secara konseptual maupun penerapannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Analisis ini akan membantu penulis dalam menangkap pola kecenderungan dan substansi nilai yang dianut guna mengukurtaraf konsisten dan efisien sebuah kedudukan hukum desa otonom dalam sistem pemerintahan Indonesia.[[53]](#footnote-53)

1. **Sumber dan Jenis Data**

Perolehan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen (studi pustaka). Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan dan dokumen-dokumen resami. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data sekunder. Data tersebut diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penulisan ini yakni:[[54]](#footnote-54)

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Desa khususnya. Dari sumber data sekunder yaitu terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian ini. Sebagai aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang diberlakukan oleh negara. Bahan primer ini merupakan statuta yang diberikan oleh Badan Legislatif, Keputusan Menteri, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain,[[55]](#footnote-55) yakni Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yakni :
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
7. Perturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
8. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
11. Peraturan Desa Cikandang Nomor 145 / 03 / Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
12. Peraturan Desa Cikandang Nomor 410 / 02 / Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa
13. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti :
    1. Risalah perundang-undangan
    2. Buku
    3. Artikel
    4. Berbagai karya tulis ilmiah
    5. Tulisan para ahli hukum
    6. Laporan hasil penelitian dan lain-lain

Bahan hukum sekunder ini menjelaskan dan memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuwan dan mahasiswa. Bahan hukum sekunder ini berbeda-berbeda dalam kualitas bentuk dan otoritas, yang berkisar dari berbagai risalah monumental yang ditulis oleh para ilmuwan besar hingga buku-buku kecil yang ditulis oleh para pengarang biasa. Meskipun sumber ini kurang memiliki otoritas hukum formal, namun beberapa buku dapat memiliki pengaruh persuasif dalam proses pembuatan hukum berkat prestise atau nama besar pengarangnyan atau kualitas keilmuannya.[[56]](#footnote-56) Keuntungan yang dapat diperoleh dengan penggunaan data sekunder adalah antara lain;

1. Penghematan tenaga dan biaya, dengan melakukan analisa terhadap data sekunder, maka dapat diadakan penelitian terhadap ruang lingkup bidang seluas-luasnya dengan biaya sehemat mungkin.
2. Kemungkin untuk memperkokoh dan memperluas dasar-dasar menarik generalisasi yang lebih luas dari hasil-hasil penelitiannya.
3. Data sekunder dapat digunakan sebagai bahan untuk mengadakan penelitian terhadap hasil-hasil penelitian yang sesungguhnya, dengan demikian maka penelitian yang sesungguhnya akan dapat dilakukan atas dasar ilmiah yang lebih kuat lagi.
4. Penelitian data sekunder tidak terikat oleh waktu dan tempat.[[57]](#footnote-57)
5. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang berupa petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan atau bahan hukum sekunder yang bersifat menunjang berasal dari :
6. Kamus.
7. Ensiklopedia.
8. Majalah.
9. Surat kabar, dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang dan penelitian.

Pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin, yaitu data diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini. Adapun langkah yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu dengan menginvestasikan ketentuan-ketentuan hukum sebagai data sekunder yang terdiri dari perturan perundang-undangan mengenai desa/pemerintahan desa maupun dari aturan pendapat sarjana, teori, jurnal, buku, makalah yang terkait dengan desa/pemerintahan desa.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasikan, dan menganilisis literatur-literatur, laporan penelitian, dokumen-dokumen resmi, serta sumber-sumber bacaan lainnya dengan cara memfotocopy, menyalin, dan memindahkan data yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

Terhadap data yang sudah diperoleh, melalui bahan hukum primer, sekunder, tersier, selanjutnya dilakukan pengolahan data, yakni kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Hal tersebut dilakukan dengan memilah dan memilih data guna memperoleh pemahanman yang utuh tentang implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terhadap Percepatan Pembangunan di Desa Cikandang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dijawab. Analisis induktif adalah analisis dengan menggunakan metode berfikir induktif, yakni menarik kesimpulan berdasarkan kasus-kasus yang parsial.[[58]](#footnote-58)

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan perundang-undangan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik.

1. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskripsi yaitu menggambarkan data yuridis-normatif. Dikatakan demikian penulis berusaha lebih awal untuk mengetahui dan memaparkan informasi teoritis secara objektif dan sistematis mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Percapatan Pembangunan di Desa Cikandang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dengan demikian, penulis akan tetap menguraikannya secara analitis keilmuan, yakni sedapat mungkin data yang diperoleh akan di analisis, baik secara konseptual maupun penerapannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Analisis ini akan membantu penulis dalam menangkap pola kecenderungan dan substansi nilai yang dianut guna mengukur taraf konsisten dan efisien sebuah implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Percepatan Pembangunan di Desa Cikandang, Kecamatan Kersana.

1. **Orisinalitas Penelitian**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Penelitian Sebelumnya** | | | |  |
| **No** | **Peneliti/Penulis** | **Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** | **Unsur Kebaruan** |
| 1 | Anak Agung Ngurah Aritama (2015, Universitas Udayana, Denpasar) | Implikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Pembangunan Spasial Di Kelurahan Kesiman Denpasar. | * + 1. Program pembangunan dalam musrenbang kelurahan kesiman berdasarkan data yang diperoleh terdapat berbagai macam program dan kegiatan pembangunan. Program dan kegiatan pembangunan tersebut diusulkan setiap tahun dan diidentifikasikan per masing-masing jenis kegiatan dan lokasi kegiatan. Dari keseluruhan program kegiatan pembangunan musrenbang di ambil periode kegiatan selama lima tahun terakhir, yakni 2010 sampai 2014.     2. Faktor yang berpengaruh pada perumusan program pembangunan antara lain adalah : faktor kebutuhan pembangunan, faktor sumber daya masyarakat, faktor perangkat desa/ sumber daya organisasi, faktor dominasi, faktor sosial budaya, faktor anggaran, faktor kebijaka, dan faktor ekonomis lahan.     3. Implikasi pelaksanaan program terhadap pembangunan spasial tidak semua program dapat terealisasi. | Penelitian ini lebih fokus kepada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Percepatan Pembangunan. |
| 2 | Kushandajani (2015, Universitas Diponegoro, Semarang) | Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa | 1. Secara normatif dengan dua azas utama “rekognisi” dan “subsidiaritas” Undang-Undang Desa mempunyai semangat perubahan yang mendasar, berbeda dengan azas “desentralisasi” dan “residualitas” yang saat ini masih terasa kuat diterapkan di desa, dimana desa dipandang hanya menjadi bagian dari daerah kabupaten. 2. Pengamatan terhadap pelaksanaan kewenangan desa eksisting menunjukan bahwa desa tidak bisa diperlakukan sama sebagaimana memperlakukan daerah kabupaten. Kabupaten disiapkan sebagai pelaksana desentralisasi, yang melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pusat. Desa berbeda, karena memiliki kewenangan yang berasal dari hak asal usul, bukan pemberian dari pusat sebagai bagian dari desentralisasi yang biasa disebut kewenangan residu. Dengan demikian otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah. | Penelitian ini lebih fokus kepada Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Percepatan Pembangunan. |

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Tinjauan Umum Tentang Desa**
2. **Pengertian Desa**

Secara umum desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi sosial yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri secara relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia”. (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : “Desa adalah desa dan desa adatnatau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (Pasal 1 ayat (43) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Diluar dari definisi menurut Undang-Undang dan Konstitusi lainnya para pakar mendefinisikan desa sebagai sesuatu yang berbeda. Menurut R.Bintarto “desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur filosofis, sosial ekonomis, politis, dan kultur yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain”.[[59]](#footnote-59) Menurut P.J. Bournen “desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semua saling mengenal, kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam, dan tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial”.[[60]](#footnote-60) Menurut I.Nyoman Bertha “desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “badan pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya”.[[61]](#footnote-61) Beda halnya dengan pengertian desa menurut R.H.Unang Soenardjo “desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena semua keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomidan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”.[[62]](#footnote-62)

Berdasarkan penjelasan empat pakar tersebut, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya, umumnya warga hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri, dan secara administrasi berada di bawah Pemerintah Kabupaten/Kota.

1. **Kewenangan Desa**

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa. (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Kewenangan Desa dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Tujuan Pembentukan Desa**

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni:[[63]](#footnote-63) *Pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga,* faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat,* faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

1. **Manfaat dan Jenis Peraturan Desa**

Manfaat Peraturan Desa antara lain:[[64]](#footnote-64)

1. Sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa;
2. Terciptanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa;
3. Memudahkan pencapaian tujuan;
4. Sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan;
5. Sebagai dasar .pengenaan sanksi atau hukuman; dan
6. Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan.

Jenis dan ragam Peraturan Desa yang disusun dan ditetapkan bergantung pada kebutuhan penyelenggara pemerintahan di desa. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Desa dan BPD agar dapat mengidentifikasi topik-topik yang perlu dibuat sebagai Peraturan Desa. Tingkat kepentingan ini hendaknya dilihat dalam kerangka kepentingan sebagian besar masyarakat agar Peraturan Desa yang dibuat benar-benar aspiratif.Peraturan Desa juga perlu dibuat karena adanya perintah atau keharusan yang ditetapkan melalui peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Desa seperti ini biasanya merupakan penjabaran dan pengukuhan dari peraturan yang lebih tinggi tersebut.

Peraturan Desa yang wajib dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun (atau sebutan lain). (Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa);
2. Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. (Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa);
3. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Desa. (Pasal 73 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa);
4. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD). (Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa);
5. Perturan Desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa);
6. Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. (Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa);
7. Peraturan Desa tentang pembentukan Badan Kerja Sama. (Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa);
8. Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan. (Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa).
9. **Pengertian Umum Pemerintahan Desa**
10. **Pengertian Pemerintahan Desa**

Pemerintah diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya. Pemerintahan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap disebut juga pemerintahan dalam arti statis, dan dapat diartikan dalam arti dinamis, yang berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat *(ambstrager)*. Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena disebut pemerintah.[[65]](#footnote-65) Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.[[66]](#footnote-66) Lebih lanjut pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015). Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.[[67]](#footnote-67)

1. Pemerintah Desa
2. Kepala desa

Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditujuk oleh pemerintah. Adapaun Pengertian kepala Desa Menurut Tahmit Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari, pambakal, hukum tua, perbekel, Peratin. Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud Kepala Desa adalah sesorang yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

1. Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, ketentuan mengenai bidang urusan diatur dengan Peraturan Menteri. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Menteri (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015). Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota dan perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa dalam membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

1. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa struktur pemerintahan desa adalah susunan secara sistematik pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan BPD.

1. **Kewenangan dan/atau Fungsi Pemerintah Desa**
2. Kewenangan dan/atau Fungsi Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas kepala desa pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
4. Menetapkan Peraturan Desa.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Membina kehidupan masyarakat Desa.
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
14. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kewenangan dan/atau Fungsi Perangkat Desa

Kewenangan dan/atau fungsi perangkat desa disini yaitu membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang

1. Kewenangan dan/atau Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Kewenangan dan/atau fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antaralain :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Kewenangan dan/atau Fungsi Pemerintahan desa adalah wewenang dan tanggungjawab yang dimiliki oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

1. **Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan produk era reformasi telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan pembangunan desa sesuai dengan pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah mensejahterakan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, penembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secaraberkelanjutan. Selanjutnya, aparatur desa mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan administrasi dan operasional pemerintahan desa, dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan secara ekonomi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan daerah dan mencari sumber-sumber pendapatan desa yang sah. Hal ini memberikan dua dampak sekaligus, yaitu pemerintah desa harus melakukan efesiensi anggaran dan harus aktif mencari sumber-sumber pendapatan alternatif.[[68]](#footnote-68)

Sebagai daerah *administratif,* desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa. Hal ini tentu akan berimplikasi pada kemampuan pemerintah desa sebagai pelaksana kewenangan otonom dan sumber keuangan potensial yang harus ditemukan. Penyelenggaraan pemerintah memerlukan sumber daya manusia yang cukup antisipatif dan inisiatif. Pemerintah desa harus antisipatif terhadap segala masalah, baik yang sudah eksis maupun secara potensial akan membebani desa. Masalah-masalah ini muncul sebagai akibat dari ke kurangmampuan pemerintah desa untuk melakukan identifikasi masalah-masalah yang dihadapi. Hal ini berhubungan dengan pemerintahan yang inisiatif.[[69]](#footnote-69) Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi menyebabkan terbentuknya ruang bagi desa untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan karakteristik masing-masing. Atas dasar itu, desa bisa saja mengambil kebijakan pembenahan sistem pemerintah sesuai dengan kondisi sosial budaya dan aspirasi masyarakat di desa. Kelahiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disambut semarak, tidak terbatas oleh pemerintah desa.

Undang-undang desa menjadi topik perbincangan di berbagai diskusi publik, media, maupun keseharian warga. Optimisme tumbuh meski tidak semua pihak menatap Undang-undang desa dengan pemahaman yang sama. Sebagian melihatnya sebagai tonggak dimulainya pendalaman demokrasi pada arah lokal, lainnya menganggap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai jalan membangun kemandirian desa dan ekonomi warga. Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa perubahan mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah dan pemerintah baik aspek kewenangan, perencanaan pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Kedudukan desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini kini lebih kuat. Asas subsidiritas dan rekognisi yang dijelaskan pada pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah mengakui dan menjamin adanya kewenangan bersifat asal-usul dan berskala desa.

Pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih lanjut menegaskan desa berkedudukan di kabupaten/kota. Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Implikasinya, desa secara politik bukan sekedar “bagian dari daerah”, di mana sebelumnya hanya menerima “sisanya sisa” kewenangan dan keuangan daerah. Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa cakupan kewenangan desa adalah penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan adat istiadat (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa). Kumpulan pasal diatas menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa dalam hal ini tugas dan kewajiban kepala desa diserahkan kepada masing-masing daerah. Sehingga dibutuhkan penyerahan wewenang dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah desa. Sudah tentu penyerahan urusan pemerintahan kabupaten tersebut menjadi urusan desa yang perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati, penyerahan urusan dimaksudkan untuk mendorong kemandirian dan keprakarsaan desa dan masyarakat sendiri, bukan dimaksudkan untuk melepas tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten karena didasarkan atas sikap yang tidak bertanggung jawab ataupun disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah daerah menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan padanya. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Setelah melalui pembahasan yang panjang DPR-RI akhirnya melahirkan keputusan politik berupa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini nantinya mulai diberlakukan pada tahun 2015. Konsideran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa seperti diatur dalam Pasal 4, bertujuan antara lain memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya, sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menjelaskan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa, guna kesejahteraan bersama, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka kebutuhan pembangunan desa otomatis dibiayai dengan bantuan alokasi anggaran bervariatif tergantung besar kecilnya desa. Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa tujuan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial. Undang-Undang ini terdiri dari 16 Bab dan 122 Pasal serta bagian penjelasan ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Walaupun terjadi penggantian Undangundang, namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap sama, yaitu:

1. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa;
2. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa;
3. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa;
4. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
5. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
6. Demokrasi, yaitu pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang yang dilaksana melalui BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai Mitra Pemerintah Desa;
7. Partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat desa;
8. Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan Desa ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Kedelapan prinsip dasar ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 3 tentang Pengaturan Desa.[[70]](#footnote-70)
9. **Dana Desa**
10. **Pengertian Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.[[71]](#footnote-71) Dana desa adalah salah satu issu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena issu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa. Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Kuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang menacakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18).Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD),
2. Anggaran Dana Desa,
3. Penyisihan pajak dan retribusi daerah,
4. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten.

Pembagian Anggaran Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan Variabel Independen utama dan Variabel Independen tambahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Anggaran Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen utama sebesar 70 % dan Variabel Independen Tambahan 30%.
2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%. Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan strukturan masyarakat di desa. Variabel Independen Utama meliputi sebagai berikut:
3. Indikator kemiskinan,
4. Indikator Pendidikan Dasar,
5. Indikator Kesehatan,
6. Indikator Keterjangkauan Desa Variabel Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah yang meliputi sebagai berikut :
7. Indikator Jumlah Penduduk,
8. Indikator Luas Wilayah,
9. Indikator Potensi Ekonomi (PBB),
10. Indikator Jumlah Unit Komunitas (Dusun).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan “anggaran dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat (4) Pasal yang sama disebutkan "Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus" (Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari desa “program yang berbasis desa”.[[72]](#footnote-72) Kementrian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembanguna nasional untuk ditetapkan sebagai sumber dana desa.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan menjadi angin segar bagi desa. Adanya undang-undang ini menjadi dasar hukum dari diakuinya desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiskal yang menjadi pokok dari berlakunya undang-unadang tersebut yaitu terkait dengan 10% dana dari APBN untuk desa diseluruh Indonesia, dimana setiap desa akan menerima dana kurang lebih besar 1 Milyar per tahun. Pembagian anggaran yang hampir seragam berkisar 1 Milyar padahal kapasitas pengelolaan pemerintah sangat beragam (hal ini akan diantisipasi melalui aturan-aturan desentralisasi fiskal yang mengatur besarnya anggaran desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa (lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belaja Negara).Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya (Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara). Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Neagara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis (Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 yang dimaksud dengan jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetepkan oleh menteri, dan pada Pasal 12 ayat (2) yang dimaksud dengan angka kemiskinan adalah presentase rumah tangga pemegang Kartu Pelindung Sosial). Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot (Pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapat Dan Belanja Negara):

1. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
2. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
3. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengalihasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara : (Lihat Pasal 12 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara)

1. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)];dan
2. Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkatkesulitan geografis setiap desa.
3. Tingkat kesulitangeografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
4. Ketersediaan pelayanan dasar;
5. Kondisi infrastruktur;
6. Transportasi; dan
7. Komunikasi desa ke kabupaten/kota.
8. **Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau/ disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian (Pasal 1 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007),yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan seuatu pekerjaan. Pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.[[73]](#footnote-73) Selain itu, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.[[74]](#footnote-74)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).[[75]](#footnote-75) Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.[[76]](#footnote-76) Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, Kepala Desa mempunyai kewewenang:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa,
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa,
3. Menetapkan bendahara desa,
4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan
5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. Perencanaan;
2. Pelaksananan;
3. Penatausahaan;
4. Pelaporan; dan
5. Pertanggungjawaban.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasakan sebagian kekeuasaannya kepada perangkat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu tahun) anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

1. **Tinjauan Umum tentang Pembangunan Desa**
2. **Pengertian Pembangunan Desa**

Pembangunan adalah suatu proses dimana anggota masyarakat pertama-tama mendiskusikan dan merencanakan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut.[[77]](#footnote-77) Lebih lanjut dikatakan pembangunan dimaksudkan untuk meletakan landasan yang kuat dan kokoh bagi masyarakat di daerah berkembang atas ketentuan kemampuan sendiri, sedangkan pemerintah hanyalah bersifat memberi bantuan, pengarahan dan bimbingan serta mengarahkan yang dapat meningkatkan usaha tumbuh dan berkembang dari desa swadaya, swakarya, desa swasembada. Pembangunan adalah suatu pembangunan dari masyarakat unit pemerintah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus, sistematis dan terarah sebagian penting dalam pembangunan Negara sebagai usaha yang menyeluruh.[[78]](#footnote-78)

Pembangunan di desa dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat maka harus diterapkan prinsip-prinsip pembangunan, sasaran pembangunan dan ruang lingkup pembangunannya. Berikut menjelaskan mengenai ketiga unsur tersebut menurut Adisasmita :[[79]](#footnote-79)

1. Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan), partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggung jawabkan (akuintabilitas) dan berkelanjutan (sustainabtle).
2. Sasaran pembangunan pedesaan yaitu untuk terciptanya peningkatan produksi dan produktivitas, percepatan pertumbuhan desa, peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta perkuatan kelembagaan.
3. Pengembangan pedesaan yang mempunyai ruang lingkup pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan, pemukiman dan lainnya), pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin) dan penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (*interrural-urban relationship*).

Pemerintah kabupaten bertanggung jawab penuh dalam rangka pembangunan desa. Pemerintah kebupaten wajib melakukan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat desa dan memberikan fasilitas kepada masyarakat. Menurut Ndraha membangun desa adalah setiap pembangunan yang ada didalam prosesnya masyarakat desa berpartisipasi aktif.[[80]](#footnote-80) Sedangkan menurut Batten, pembangunan desa adalah suatu proses dimana organisasi atau masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian mereka merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup,[[81]](#footnote-81) Akan tetapi dalam menentukan pembangunan desa ini, banyak sekali hambatan yang dapat ditemui. Hambatan-hambatan itu menurut Butterfield dalam Ndraha, adalah :[[82]](#footnote-82)

1. Perbedaan persepsi. Perencanaan pembangunan sering tidak tepat dalam menanggapi antara apa yang pemerintah dengan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dipedesaan. Sehingga terjadi permasalahan dalam pembangunan desa, karena masyarakat desa memilki persepsi yang buruk terhadap pembangunan yang dilakukan didesanya.
2. Kesukaran memilih model pembangunan yang tepat. Kesulitan ini muncul karena masyarakat pedesaan itu pada umumnya tertutup dan masih bingung dalam menerima hal-hal baru sehingga pemerintah pun menjadi bingung dalam menentukan model pembangunan apa yang sebaiknya diterapkan bagi masyarakat pedesaan.
3. Batasan waktu, dimana pembangunan pedesaan lambat sekali kelihatan hasilnya sehingga pemerintah sering merasa kurang sabar dalam menangani usaha pembangunan desa.
4. Persoalan praktis, hambatan ini muncul bila hal-hal dalam tarap pelaksanaanya membuat pembangunan desa terlambat, misalnya saja kurangnya teknologi, kurangnya pengelola yang terlatih dan sebagianya.

Memperhatikan kekurangan dan kegagalan perencanaan pembangunan di desa pada masa lalu, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pendekatan pembangunan di desa atau pedesaan yang sesuai dengan kompleksitas pembangunan serta aspirasi masyarakat.

**BAB III**

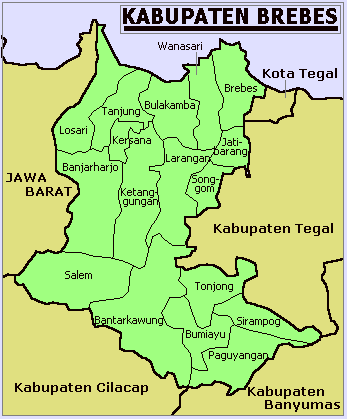
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**
2. **Gambaran Umum Kabupaten Brebes**
3. **Sejarah Terbentuknya Kabupaten Brebes**

Ada beberapa pendapat mengenai asal-usul nama Brebes. Salah satu pendapat menyatakan bahwa nama Brebes berasal dari kata *“Bara”* dan *“Basah”*, bara berarti hamparan tanah luas dan basah berarti banyak mengadung air. Keduanya cocok dengan keadaan daerah Brebes yang merupakan dataran luas yang berarair. Karena perkataan bara diucapkan bere sedangkan basah diucapkan besah maka untuk mudahnya diucapkan Brebes. Dalam Bahasa Jawa perkataan Brebes atau *mbrebes* berarti *tansah metu banyune* yang berarti selalu keluar airnya.[[83]](#footnote-83)

Nama Brebes muncul sejak zaman Mataram. Kota ini berderet dengan kota-kota tepi pantai lainnya seperti Pekalongan, Pemalang, dan Tegal. Brebes pada saat itu merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tegal. Pada tanggal 17 Januari 1678 di Jepara diadakan pertemuan Adipati Kerajaan Mataram se Jawa Tengah, termasuk Arya Martalaya, Adipati Tegal dan Arya Martapura, Adipati Jepara. Karena tidak setuju dengan acara penandatanganan naskah kerjasama antara Amangkurat Admiral dengan Belanda terutama dalam menumpas pemberontakan Trunajaya dengan imbalan tanah-tanah milik Kerjaan Mataram, maka terjadi perang tanding antara kedua adipati tersebut. Peristiwa berdarah ini merupakan asal mula terjadinya Kabupaten Brebes dengan Bupati berwenang. Sehari setelah peristiwa berdarah tersebut yaitu tanggal 18 Januari 1678, Sri Amangkurat II yang berada di Jepara mengangkat beberapa Adipati/ Bupati sebagai pengganti Adipati-adipati yang gugur untuk Kabupaten Brebes dijadikan kabupaten mandiri dengan adipati Arya Suralaya yang merupakan adik dari Arya Martalaya. Pengangkatan Arya Suralaya sekaligus titimangsa pemecahan Kadipaten Tegal menjadi dua bagian yaitu timur tetap disebut Kadipaten Tegal dan bagian barat disebut Kabupaten Brebes.

1. **Letak Geografis Kabupaten Brebes**



Kabupaten Brebes terletak dibagian Utara paling Barat Provinsi Jawa Tengah, diantara koordinat 1080 41’37,7”- 1090 11’28,92” Bujur Timur dan 60 44’56’5”- 70 20’51,48” Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat.[[84]](#footnote-84) Penduduk kabupaten Brebes mayoritas mengunakan bahasa jawa yang mempunyai cirri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, biasanya disebut dengan Bahasa Jawa Brebes. Namun terdapat kenyataan pula bahwa sebagian penduduk kabupaten Brebes juga bertutur dalam bahasa Sunda dan banyak nama tempat yang dinamai dengan bahasa Sunda menunjukan bahwa pada masa lalu wilayah ini adalah bagian dari wilayah sunda. Daerah yang masyarakatnya sebagian besar menggunakan bahasa Sunda atau biasa disebut dengan Bahasa Sunda Brebes, adalah meliputi Kecamatan Salem, Banjarharjo, Bantarkawung, dan sebagaian lagi ada dibeberapa desa di Kecamatan Losari, Tanjung, Kersana, Ketanggungan dan Larangan.

Berdasarkan naskah kuno primer Bujangga Manik (yang menceritakan perjalanan Prabu Bujangga Manik, seorang pendeta Hindu Sunda yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16), yang saat ini disimpan pada Perpustakaan Boedlian, *Oxford University,* Inggris sejak tahun 1627, batas Kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Ci Pamali (sekarang disebut sebagai Sungai Brebes atau Kali Pemali yang melintasi pusat kota Brebes) dan Ci Serayu (yang saat ini disebut Sungai Serayu atau Kali Serayu) di Provinsi Jawa Tengah. Brebes merupakan kabupaten yang cukup luas di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah, bagian barat daya merupakan dataran tinggi (dengan puncaknya Gunung Pojok Tiga dan Gunung Kumbang), sedangkan bagian tenggara terdapat pegunungan yang merupakan bagian dari Gunung Slamet, dengan iklim tropis, curah hujan rata-rata 18,94 mm/ per bulan. Kondisi itu menjadikan kawasan tersebut sangat potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti tanaman padi, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan sebagainya.

1. **Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Brebes**

Secara administratif Kabuaten Brebes terbagi dalam 17 kecamatan, yang terdiri atas 292 desa dan 5 kelurahan. Di dalam Pola Perwilayahan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes termasuk Wilayah Pembangunan II dengan pusat di Tegal, kabupaten Brebes sendiri dala perwilayahan pembangunan dibagi menjadi 3 Sub Wilayah Pembangunan (SWP) yaitu:[[85]](#footnote-85)

1. SWP Ia, dengan pusat di Brebes, meliputi Kecamatan Brebes, Wanasari, Jatibarang, dan Songgom. Sector yang dapat dikembangkan adalah pertanian, khususnya sub sector perikanan, sector perdagangan/jasa, dan sector pemerintahan.
2. SWP Ib, dengan pusat di Tanjung, meliputi Kecamatan Tanjung, Losari dan Bulakamba. Sector yang dapat dikembangkan adalah sector perdagangan dan pertanian.
3. SWP II, dengan pusat di Ketanggungan meliputi Kecamatan Ketanggungan, Banjarharjo, Larangan dan Kersana. Sector yang dapat dikembangkan diwilayah ini adalah sector pertanian khususnya sub sector tanaman panga antaralain meliputi sayur, mayor, bawang merah dan Lombok serta sector pemerintahan.
4. SWP III, dengan pusat di kota Bumiayu meliputi Kecamatan Bumiayu, Tonjong, Sirampog, Paguyangan, Bantarkawung dan Salem. Sector yang dikembangkan adalah sector pertanian, industri kecil, pariwisata dan perdagangan.

Berikut daftar kecamatan dan kelurahan atau desa di kabupaten Brebes beserta kodeposnya:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kecamatan | Kode Pos | Kelurahan / Desa |
| Banjarharjo | 52265 | Bandungsari, Banjar Lor, Banjarharjo, Blandongan, Ciawi, Cibendung, Cibuniwangi, Cigadung, Cihaur, Cikakak, Cikuya, Cimunding, Cipajang, Dukuhjeruk, Karangmaja, Kertasari, Kubangjero, Malahayu, Parireja, Penanggapan, Pende, Sindangheula, Sukareja, Tegalreja, Tiwulandu |
| Bantarkawung | 52274 | Bangbayang, Banjarsari, Bantarkawung, Bantarwaru, Cibentang, Cinanas, Ciomas, Jipang, Karangpari, Kebandungan, Legok, Pangebatan, Pakiringan, Pengarasan, Sidangwangi, Tambakserang, Telaga, Terlaya, Waru |
| Brebes | 52211 | Pasarbatang |
|  | 52212 | Brebes |
|  | 52213 | Pulosari |
|  | 52214 | Padasugih, Wangandalem |
|  | 52215 | Gandasuli |
|  | 52216 | Banjaranyar |
|  | 52217 | Kaligangsa Kulon, Kaligangsa Wetan |
|  | 52218 | Limbangan Wetan |
|  | 52219 | Kalimati, Kaliwlingi, Kedunguter, Krasak, Lembarawa, Limbangan Kulon, Pagejugan, Pemaron, Randusanga Kulon, Randusanga Wetan, Sigambir, Tengki, Terlangu |
| Bulakamba | 52253 | Bangsri, Banjaratma, Bulakamba, Bulakparen, Bulusari, Cimohong, Cipelem, Dukuhlo, Grinting, Jubang, Karangsari, Kluwut, Luwungragi, Pakijangan, Petunjungan, Pulogading, Rancawuluh, Siwuluh, Tegalglagah |
| Bumiayu | 52273 | Adisana, Bumiayu, Dukuhturi, Jatisawit, Kalierang, Kalilangkap, Kalinusu, Kalisumur, Kaliwadas, Langkap, Laren, Negaradaha, Pamijen, Penggarutan, Pruwatan |
| Jatibarang | 52261 | Bojong, Buaran, Janegara, Jatibarang Kidul, Jatibarang Lor, Kalialang, Kalipucang, Karanglo, Kebogadung, Kebonagung, Kedungtukang, Kemiriamba, Kendawa, Kertasinduyasa, Klampis, Klikiran, Kramat, Pamengger, Pedeslohor, Rengasbandung, Tegalwulung, Tembelang |
| Kersana | 52264 | Ciampel, Cigedog, Cikandang, Jagapura, Kemukten, Kersana, Kradenan, Kramatsampang, Kubangpari, Limbangan, Pende, Sindangjaya, Sutamaja |
| Ketanggungan | 52263 | Baros, [Buara](http://id.wikipedia.org/wiki/Buara,_Ketanggungan,_Brebes), [Bulakelor](http://id.wikipedia.org/wiki/Bulakelor,_Ketanggungan,_Brebes), [Ciduwet](http://id.wikipedia.org/wiki/Ciduwet,_Ketanggungan,_Brebes), [Cikeusal Kidul](http://id.wikipedia.org/wiki/Cikeusal_Kidul,_Ketanggungan,_Brebes), [Cikeusal Lor](http://id.wikipedia.org/wiki/Cikeusal_Lor,_Ketanggungan,_Brebes), [Ciseureuh](http://id.wikipedia.org/wiki/Ciseureuh,_Ketanggungan,_Brebes), [Dukuhtengah](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dukuhtengah,_Ketanggungan,_Brebes&action=edit&redlink=1), [Dukuhbadag](http://id.wikipedia.org/wiki/Dukuhbadag,_Ketanggungan,_Brebes), [Dukuhturi](http://id.wikipedia.org/wiki/Dukuhturi,_Ketanggungan,_Brebes), [Jemasih](http://id.wikipedia.org/wiki/Jemasih,_Ketanggungan,_Brebes), [Karangbandung](http://id.wikipedia.org/wiki/Karangbandung,_Ketanggungan,_Brebes), [Karangmalang](http://id.wikipedia.org/wiki/Karangmalang,_Ketanggungan,_Brebes), [Ketanggungan](http://id.wikipedia.org/wiki/Ketanggungan,_Ketanggungan,_Brebes), [Kubangjati](http://id.wikipedia.org/wiki/Kubangjati,_Ketanggungan,_Brebes), [Kubangsari](http://id.wikipedia.org/wiki/Kubangsari,_Ketanggungan,_Brebes), [Kubangwungu](http://id.wikipedia.org/wiki/Kubangwungu,_Ketanggungan,_Brebes), [Padakaton](http://id.wikipedia.org/wiki/Padakaton,_Ketanggungan,_Brebes), [Pamedaran](http://id.wikipedia.org/wiki/Pamedaran,_Ketanggungan,_Brebes), [Sindangjaya](http://id.wikipedia.org/wiki/Sindangjaya,_Ketanggungan,_Brebes), [Tanggungsari](http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggungsari,_Ketanggungan,_Brebes) |
| Larangan | 52262 | |  |  | | --- | --- | |  | [Kamal](http://id.wikipedia.org/wiki/Kamal,_Larangan,_Brebes), [Karangbale](http://id.wikipedia.org/wiki/Karangbale,_Larangan,_Brebes), [Kedungbokor](http://id.wikipedia.org/wiki/Kedungbokor,_Larangan,_Brebes), [Larangan](http://id.wikipedia.org/wiki/Larangan,_Larangan,_Brebes) , [Luwunggede](http://id.wikipedia.org/wiki/Luwunggede,_Larangan,_Brebes), [Pamulihan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pamulihan,_Larangan,_Brebes), [Rengaspendawa](http://id.wikipedia.org/wiki/Rengaspendawa,_Larangan,_Brebes), [Siandong](http://id.wikipedia.org/wiki/Siandong,_Larangan,_Brebes) , [Sitanggal](http://id.wikipedia.org/wiki/Sitanggal,_Larangan,_Brebes), [Slatri](http://id.wikipedia.org/wiki/Slatri,_Larangan,_Brebes), [Wlahar](http://id.wikipedia.org/wiki/Wlahar,_Larangan,_Brebes), [Poncol](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Poncol,_Larangan,_Brebes&action=edit&redlink=1) | |
| Losari | 52255 | Babakan, Blubuk, Bojongsari, Dukuhsalam, Jati Sawit, Kalibuntu, Karangdempel, Karangjunti, Karangsambung, Kecipir, Kedungneng, Limbangan, Losari Kidul, Losari Lor, Negla, Pekauman, Pengabean, Pragpag Kidul, Prapag Lor, Randegan, Randusari, Rungkang |
| Paguyangan | 52276 | Cilibur, Cipetung, Kedungoleng, Kretek, Pagojengan, Paguyangan, Pakujati, Pandansari, Regatunjung, Taraban, Wanatirta, Winduaji |
| Salem | 52275 | Banjaran, Bentar, Bentarsari, Capar, Ciputih, Citimbang, Gandongan, Ganggawang, Gunung Larang, Gunung Sugih, Gunung Tajem, Indrajaya, Kadumanis, Pabuaran, Pasir Panjang, Salem, Tembongraja, Gunung Jaya, Wanoja, Windu Sakti, Winduasri |
| Sirampog | 52272 | Batursari, Benda, Buniwah, Dawuhan, Igirklanceng, Kaligiri, Kaliloka, Manggis, Mendala, Mlayang, Plompong, Sridadi, Wanareja |
| Songgom | 52266 | Cenang, Dukuhmaja, Gegerkunci, Jatimakmur, Jatirokeh, Karangsembung, Songgom, Songgom Lor, Wanacala, Wanatawang |
| Tanjung | 52254 | Karangreja, Kedawung, Kemurang Kulon, Kemurang Wetan, Krakahan, Kubangputat, Lemah Abang, Luwung Gede, Luwungbata, Mundu, Pejagan, Pengaradan, Sarireja, Sengon, Sidakaton, Tanjung, Tegongan, Tengguli |
| Tonjong | 52271 | Galuh Timur, Kalijurang, Karangjongkeng, Kutamendala, Kutayu, Linggapura, Negarayu, Pepedan, Purbayasa, Purwodadi, Rajawetan, Tanggeran, Tonjong, Watujaya |
| Wanasari | 52221 | Pesantunan |
|  | 52222 | Pebatan |
|  | 52252 | Dukuhwringin, Dumeling, Glonggong, Jagalampeni, Keboledan, Kertabesuki, Klampok, Kupu, Lengkong, Sawojajar, Siasem, Sidamulya, Sigentong, Sisalam, Siwunguk, Tanjungsari, Tegalgandu, Wanasari |

1. **Gambaran Umum Desa Cikandang, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes**
2. **Sejarah Terbentuknya Desa Cikandang**

Sejarah asal-usul Desa Cikandang tak terlepas dari sejarah dan asal-usul desa di sekitarnya, termasuk desa Cigedog. Menurut nara sumber dari para sesepuh dan pinisepuh yang sulit ditemukan, pada awalnya desa Cikandang dan desa Cigedog membujur dari barat ke timur yang dibelah oleh jalan duwet di desa Cigedog dan jalan panjunan / walisongo di desa Cikandang. Warga masyarakat kedua desa dalam kesehariannya menggunakan bahasa sunda. Di ujung desa sebelah timur, mengalir sungai kebuyutan yang hampir setiap musim penghujan airnya meluap/banjir ketengah-tengah desa di karenakan aliran air sungai kebuyutan yang tidak lurus tetapi dari selatan membelok ketengah-tengah desa. Oleh karena bencana banjir datang setiap tahun, masyarakat berupaya mengendalikan air sungai dengan cara membuat sodetan meluruskan aliran dan membendung aliran-aliran yang menuju ketengah-tengah desa. Luas aliran air yang dibendung (dicikandang) kurang lebih 4 Ha. Sehingga bagi penduduk sekitar merupakan pemandangan mengasikan karena ada “KANDANG CAI” di tengah desa (Embung). Terkenallah kampung tersebut dinamakan “CAI KANDANG” artinya CAI/CI berarti air, KANDANG (air dalam bendungan), bahkan dapat dimanfaatkan untuk pengairan pertanian. Musim berganti jaman berubah, akan halnya desa Cigedog, karena kebutuhan penjajah, Belanda membuat jalan raya dari jalan Deandeles (Tanjung) menuju ke Waduk Malahayu (Banjarharjo). Jalan tersebut digunakan sebagai pembatas antara desa Cigedog dan desa Cikandang seperti sekarang ini.

1. **Letak dan Luas Wilayah**

Desa Cikandang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu desa di kecamatan Kersana yang mempunyai jarak 1 km dari Kabupaten Brebes. Secara geografis Desa Cikandang sendiri terletak berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara : Desa Ciampel;
2. Sebelah Timur : Desa Duku Badag;
3. Sebelah Selatan : Desa Kubangpari;
4. Sebelah Barat : Desa Cigedog.

Luas wilayah desa Cikandang 230.000 Ha, Letak topografis tanahnya datar, dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, perkebunan dan perikanan sehingga sebagian besar masyarakat desa adalah petani dan petani penggarap. Luas kemiringan lahan (rata-rata) datar 3,5 Ha, dan ketinggian diatas permukaan laut (rata-rata) 27 mdpl.

1. **Struktur Organisasi Pemerintahan dan Keadaan Penduduk Desa Cikandang**

Struktur organisasi Pemerintahan Desa Cikandang, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes Tahun 2017, antaralain :

1. Djemingin. A. Ma. Pd (Kepala Desa);
2. Waryono (Kepala Dusun);
3. Rustam (Kepala Urusan Keuangan);
4. Junaedi (Kepala Urusan Pemerintahan);
5. Samsul Muin Abadi (Kepala Urusan Umum);
6. Abu Yazid (Kepala Urusan Kesra).

Desa Cikandang terdiri dari 7 RW dan 25 RT, dengan jumlah penduduk pada saat ini adalah 8.728 jiwa. Terdiri dari laki-laki 4.201 dan perempuan 4.527. Sebagian besar penduduk beragama islam. Mata pencaharian penduduk dari usia 10 Tahun ke atas terdiri 1.269 jiwa sebagai Petani, 2.400 jiwa sebagai Buruh tani. Pendidikan penduduk menurut umur (5 tahun ke atas) antaralain :

1. Tamat Akademik : 287 jiwa; dan
2. Usia Sekolah : 1.000 jiwa.
3. **Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Faktor Penghambat Terhadap Percepatan Pembangunan Di Desa Cikandang, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes**

Komitmen pemerintah dewasa ini yang mengorientasikan pembangunan kewilayah perdesaan dan pulau-pulau terpencil, menunjukan bahwa pemerintah ingin meningkatkan peran dan kontribusi kawasan perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional, terciptanya lapangan kerja di desa, meningkatnya kesejahteraan, meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman perdesaan serta meningkatnya akses, kontrol, dan partisipasi elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Adanya kenaikan dana desa ditujukan untuk pembangunan dan memperkuat infrastruktur demi menunjang ekonomi warga desa. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) merupakan program bantuan pembangunan infrastruktur perdesaan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan perekonomian perdesaan. PPIP dilaksanakan secara partisipatif dimana masyarakat dapat memilih infrastruktur yang diinginkan, dengan pendekatan partisipatif, prioritas infrastruktur bergantung pada kemampuan masyarakat dalam memilih. Infrastruktur atau prasana dan sarana dasar yang dibutuhkan bagi kehidupan dan penghidupan. Pembangunan infrastruktur termasuk kedalam kategori pembangunan fisik. Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemerataan pembangunan dibidang infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan di berbagai bidang.

Pembangunan perdesaan seharusnya dilaksanakan secara komprehensif-integral menuju terciptanya desa yang mandiri, yang berarti tidak dapat dilakukan secara seragam disetiap daerah di wilayah negara ini. Melihat kondisi desa diseluruh tanah air yang beragam, maka pembangunan desa juga tidak bisa dikelola secara terpusat oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Oleh karena itu, desa perlu dikelola oleh pemerintahan tersendiri yang mengatur dan mengelola pembangunan di desa. Pembangunan masyarakat desa memang harus bersumber dari manusia dan masyarakat desa itu sendiri, karena sejatinya merekalah yang paling mengetahui apa harapan, kebutuhan dan keinginannya. Seperti dikatakan Daldjoeni dan Suyitno,[[86]](#footnote-86) bahwa pembangunan perdesaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana orang-orang disitu bersama-sama pejabat pemerintah berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian, sosial dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkutan, mengintegrasikan masyarakat ini dalam kehidupan bangsa dan dapat membantu kehidupan bangsa dan negara. Namun dalam membangun desa, menurutnya jangan sampai ada dirigisme para pejabat dalam membangun sehingga target saja yang rasanya dikejar. Sebaliknya, pembangunan perdesaan seharusnya merespon tiga jenis lingkungan yang menantang, yakni: kondisi sosial ekonomi, latar belakang sejarah dan lingkungan alam.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Desa termasuk kategori Undang-Undang baru, karena disahkan tahun 2014, sehingga dalam pelaksanaan masih banyak hambatan. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentunya menjumpai berbagai kendala atau hambatan-hambatan. Kurang maksimalnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Cikandang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes merupakan salah satu faktor penghambat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hasil dari wawancara dengan bapak Djemingin yang merupakan Kepala Desa Cikandang menyatakan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disadari masih banyak aparatur desa yang belum memahami isi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bukan hanya di Desa Cikandang saja tetapi juga di desa desa lain di Kecamatan Kersana. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan langkah awal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sosialisasi sangat di perlukan untuk aparatur desa, karena aparatur desa merupakan kunci utama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat terealisasi dengan baik atau tidak. Tujuan proses sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara pemerintah pusat dengan aparatur desa adalah untuk menyamakan persepsi terkait dengan tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu membangun desa mandiri baik secara politik maupun ekonomi yang nantinya berdampak pada kesejahteraan desa.

Persepsi yang ingin dibangun dari sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah konsep desa membangun, memastikan bahwa desa adalah subyek utama pembangunan desa. Konsep ini sangat relevan dengan kewenangan lokal berskala desa dan hak asal usul. Konsep desa membangun menegaskan bahwa desa berhak untuk merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan evaluasi pembangunan secara mandiri berdasarkan prakarsa lokal desa. Peran pemerintah desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat penting, sehingga dari proses sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan pemerintah desa memahami betul bagaimana proses mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kondisi masyarakat terhadap pengimplementasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap percepatan pembangunan di Desa Cikandang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes masyarakatnya apatis terhadap persoalan tersebut, sehingga ini yang menyebabkan implementasi Undang-Undang Desa tersebut tidak optimal.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Cikadang, sementara menunggu intruksi dari Kabupaten Brebes, karena ada ketentuan pemerintah pusat, bahwa dana desa dialokasikan secara serentak dan difokuskan pada 3 hal yaitu perbaikan infrastruktur, irigasi dan sosial kemasyarakatan. Tujuan dari pengalokasian dana desa secara serentak adalah agar aparatur desa tidak mengalami kebingungan dalam mengalokasikan dana desa. Mengingat kesiapan aparatur desa untuk menyerap dan mengalokasikan dana desa belum maksimal. Hal ini menyebabkan antara pemerintah desa satu dengan yang lain saling berkoordinasi dan bekerjasama, bertukar informasi terkait penggunaan dana desa. Kerjasama para aparatur desa diharapkan mampu menyamakan persepsi tentang upaya untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan harapan serapan dana desa akan mampu membawa kemajuan dan pembangunan sehingga dana desa akan mampu membentuk desa mandiri. Kerjasama yang dilakukan diantaranya dengan melaksanakan kegiatan musyawarah kepala desa secara rutin, untuk membahas program desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pelaksanaannya tentu menjumpai banyak hambatan. Hambatan-hambatan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sangat beragam dirasakan para aparatur desa di Desa Cikandang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Hambatan yang dialami bisa dari faktor internal yaitu dari diri aparatur desa itu sendiri misalnya SDM, perasaan takut melakukan kesalahan, sikap yang sangat hati-hati, sikap tidak jujur dalam penggunaan dana desa, dan lain-lain. Faktor eksternal, misalnya regulasi/peraturan, kebijakan yang ditetapkan oleh pusat maupun daerah, kurangnya pendampingan dan lain-lain.

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu yang juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemerintahan desa. Sebagian dari perangkat desa di Desa Cikandang masih belum bisa mengoperasikan perangkat komputer karena kualitas sumber daya manusia (SDM) masih kurang. Hal ini di latar belakangi oleh kurang dilakukannya pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengadministrasian misalnya salah satu dalam pelatihan mengoperasikan komputer. Komputer adalah alat satu penunjang kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kurangnya wawasan dan pengalaman yang dimiliki perangkat desa merupakan salahsatu indikator yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kurangnya pemahaman dan kesiapan aparatur desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebabkan karena faktor SDM dari aparatur desa yang hanya sampai sekolah menengah atas, menjadikan hambatan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mereka mengaku kesulitan dalam mekanisme pencairan dana desa, karena harus dibuat dalam Miscrosoft excel dengan rinciannya. Padahal aparatur desa masih ada yang belum bisa mengoperasikan Microsoft Excel dengan baik. Kesiapan lainnya adalah terkait komitmen dan kesadaran aparatur desa untuk mengalokasikan dana desa, kesadaran aparatur desa untuk segera membuat syarat pencairan dana desa masih rendah. Pemahaman para aparatur desa terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih sangat minim karena kurangnya sosialisasi Undang-Undang Desa. Mekanisme pencairan dana desa juga menjadi hambatan bagi aparatur desa, karena syarat untuk mencairkan dana desa tidak segera dipenuhi secara otomatis dana tidak bisa cair, lamanya proses pencairan dana desa akan menghambat pengalokasian dana desa. Hambatan lain dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah peraturan tentang Undang-Undang desa yang sering berubah dan tumpang tindih.

Faktor rasa takut dalam menggunakan dana desa juga dialami oleh aparatur desa, ketakutan penggunaan dana desa membuat aparatur desa lebih memilih untuk menunggu instruksi dari pemerintah kabupaten, sehingga aparatur desa tidak berani menggunakan dana desa jika belum ada instruksi dari pemerintah kabupaten. Pemerintah desa khawatir tersangkut kasus hukum apabila salah mengeluarkan kebijakan terkait dengan penggunaan dana desa. Padahal disisi lain rendahnya penyerapan anggaran membuat sinergi rencana pembangunan pemerintah pusat dan daerah tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga pembangunan desa menjadi terhambat. Ketakutan untuk mengambil kebijakan, sinergi rencana pembangunan terganggu, maka otomatis upaya percepatan kesejahteraan masyarakat menjadi ikut terganggu. Aparatur desa menjadi sangat membutuhkan payung hukum terkait penggunaan dana anggaran desa.

Faktor eksternal misalnya dari regulasi Undang-Undang Desa itu sendiri, peraturan tentang Undang-Undang dan dana desa yang bersifat multitafsir dan seringkali berubah salah satunya menjadi hambatan bagi aparatur desa dalam implementasi Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Substansi-substansi dalam Undang-Undang Desa dapat terlaksana dengan baik bilamana telah terbentuk peraturan pelaksananya. Terkait dengan hal tersebut, banyak substansi aturan Undang-Undang Desa belum dibentuk, dalam Undang-Undang Desa ada beberapa amanat Rancangan Peraturan Pemerintah terutama mengenai:

1. Tata cara pemilihan Kepala Desa Serentak (Pasal 31);
2. Pemberhentian Kepala Desa (Pasal 40);
3. Musyawarah Desa (Pasal 47);
4. Perangkat Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 50);
5. Besaran Penghasilan Tetap serta Penerimaan Lainnya yang sah (Pasal 66);
6. Pengelolaan Kekayaan Milik Desa (Pasal 77);
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Pasal 79).

Regulasi yang tumpang tindih tidak hanya menyebabkan perintah desa kebingungan untuk melaksanakan Undang-Undang Desa, akan tetapi juga memberatkan pemerintah desa serta pemerintah kabupaten/kota dalam menyerap dana desa. Kebijakan yang diambil pemerintah pusat terkait penyederhanaan syarat penggunaan dana desa akan diatur, agar pemerintah desa tidak bingung saat menyusun APBDes, maka penggunaan dana desa difokuskan pada infrastruktur, irigasi, dan sosial kemasyarakatan. Prosedur pencairan dana desa pemerintah desa cukup menyerahkan dokumen APBDes kepada pemerintah kabupaten/kota, adapun dokumen lain adalah rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79, pemerintah desa harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan jabaran RPJMDes tahunan. Selanjutnya dalam Pasal 80 dijelaskan bahwa prioritas kegiatan pembangunan desa meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar,
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia,
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif,
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, dan
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa.

Hambatan lainnya adalah adanya peraturan yang bersifat multitafsir antara 3 kementrian yaitu:

1. Peraturan Mentri Desa Nomor 5 Tahun 2015 yang menyatakan dana desa diprioritaskan untuk belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 yang menyebutkan dana untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 meminta desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sedangkan Menteri keuangan mengatur agar laporan realisasi penggunaan dana desa diajukan setiap akhir semester sehingga aparatur desa harus menyusun dua laporan terpisah.[[87]](#footnote-87)
4. **Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Percepatan Pembangunan**

Kesiapan aparatur desa dalam implementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Cikandang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes cenderung pasif karena kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Brebes. Aparatur desa tidak bisa membuat program sendiri, walaupun sebenarnya aparatur desa sudah mempunyai program yang ingin dilaksanakan untuk kemajuan desa, misalnya pelatihan ketrampilan, penuntasan pengangguran, santunan untuk fakir miskin dan jompo, akan tetapi belum bisa terealisasi karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Cikandang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes fokus pada pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan pemukiman, dan perbaikan gedung, aula dan kantor balai desa. Pembangunan desa di Desa Cikandang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes dari hasil penelitian prioritas kegiatan pembangunan desa sesuai Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di fokuskan pada point ke 2, yaitu pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia. Point prioritas kegiatan sesuai Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang lain seperti peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa belum dilaksanakan. Hal ini di karenakan program pembangunan desa yang dibuat terstruktur sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

Berbagai upaya yang akan di tempuh Desa Cikandang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes untuk mengatasi hambatan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap percepatan pembangunan, antara lain :

1. Penataan desa perlu segera disiapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dengan memprioritaskan penataan sistem administrasi desa dan memasukkan agenda pengembangan kapasitas SDM untuk membangun manajemen yang efektif.
2. Memprioritaskan pemetaan kapasitas desa untuk menentukan tipologi desa melalui perhitungan aset desa, kapasitas sumber daya manusia, jumlah dan sebaran penduduk desa, ketersediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat desa, serta kondisi ekonomi, sosial, dan kultural masyarakat desa. Sehingga perencanaan desa dimasa mendatang tidak hanya sekedar mengacu pada apa yang sudah ada saat ini.
3. Menetapkan program pembelajaran yang berkelanjutan untuk mendongkrak kapasitas dan kinerja desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
4. Meningkatkan kapasitas perangkat desa, diarahkan pada dua hal pokok yaitu: a. penguatan kapasitas dalam pemetaan sosial dan perencanaan pembangunan desa; b. penguatan kapasitas dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran desa untuk kepentingan masyarakat luas.
5. Memperkuat musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan desa.[[88]](#footnote-88)

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan uraian hasil penelitian pada hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Pada bab ini akan dirumuskan secara garis besar mengenai hal pokok yang berkaitan dengan hasil penelitian, rumusan kesimpulan tersebut adalah mengenai Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap percepatan pembangunan di Desa Cikandang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Percepatan Pembangunan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Latar Belakang Faktor Penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap percepatan pembangunan di Desa Cikandang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes meliputi berbagai faktor, faktor tersebut meliputi persoalan substansi hukum Undang-Undang Desa itu sendiri, peraturan tentang Undang-Undang dan dana desa yang bersifat multitafsir dan seringkali berubah, struktur hukum berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Cikandang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes, sehingga menimbulkan rasa takut bagi para perangkat desa (aparatur desa) dalam menggunakan dana desa, dan kultur hukum yang menyangkut kondisi masyarakat terhadap pengimplementasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap percepatan pembangunan di Desa Cikandang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes masyarakatnya apatis terhadap persoalan tersebut, sehingga ini yang menyebabkan implementasi Undang-Undang Desa tersebut tidak optimal.
2. Berbagai upaya yang sudah di tempuh Desa Cikandang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes untuk mengatasi hambatan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap percepatan pembangunan, antara lain :
3. Meningkatkan kapasitas perangkat desa, diarahkan pada dua hal pokok yaitu:
4. Penguatan kapasitas dalam pemetaan sosial dan perencanaan pembangunan desa;
5. Penguatan kapasitas dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran desa untuk kepentingan masyarakat luas.
6. Menetapkan program pembelajaran yang berkelanjutan untuk mendongkrak kapasitas dan kinerja desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
7. Memperkuat musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan desa.

Upaya yang belum terlaksana di Desa Cikandang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes untuk mengatasi hambatan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap percepatan pembangunan, antara lain:

1. Penataan desa oleh pemerintah Kabupaten/Kota dengan memprioritaskan penataan sistem administrasi desa dan memasukkan agenda pengembangan kapasitas SDM untuk membangun manajemen yang efektif;
2. Pemetaan kapasitas desa untuk menentukan tipologi desa melalui perhitungan aset desa, kapasitas sumber daya manusia, jumlah dan sebaran penduduk desa, ketersediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat desa, serta kondisi ekonomi, sosial, dan kultural masyarakat desa. Sehingga perencanaan desa dimasa mendatang tidak hanya sekedar mengacu pada apa yang sudah ada saat ini.
3. **Saran**

Pada akhir penulisan hukum ini, penulis akan mengemumakan sedikit saran sebagai berikut :

1. Seluruh jajaran perangkat desa (Aparat Desa) di Desa Cikandang mengadakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengadministrasian misalnya salah satu dalam pelatihan mengoperasikan komputer karena komputer adalah alat satu penunjang kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Melakukan pendampingan bagi aparatur desa di Desa Cikandang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Aparatur desa harus memiliki Komitmen yang kuat untuk memaksimalkan penggunaan dana desa baik untuk perbaikan infrastruktur, irigasi maupun sosial kemasyarakatan.
4. Memberi pelatihan kepada aparatur desa agar profesional dalam mengelola keuangan dan pembangunan desa yang partisipatif dan transparan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

A.Muhammad Nasrun, 2004, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung,* ELSAM.

Abdul Wahab Solichin, 2008, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik,* Malang : Universitas Muhamadiyah Malang.

Arif, Muhammad, 2007, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, Pekanbaru: ReD Post Press.

Azhari, 2010, *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini),* Prenada.

B. Hestu Cipto Handoyo, 2008, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik,* Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.

Bambang Soemantri, 2011, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa,* Bandung : Fokusmedia.

Bintoro Tjokroamidjojo, 1986, *Tujuan Pembangunan Nasional Menggerakan, Menguatkan Potensi Kreativitas.*

Bryant Coralie dan White Louise, 1998, *Manajemen Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.

Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.

Clifford Geertz, Negara, 2000, *The Theater State in Nineteeth – Century Bali,* yang diterjemahkan sebagai *Negara Teater, Kerajaan-kerajaan di Bali Abad Kesembilan Belas,* Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, dalam Suhartono, Politik Lokal, Lepara Pustaka Umum, Yogyakarta, 2000.

Deddy Supriady Brata Kusumah, dan Riyadi, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah,* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa, 2007, *Laporan Akhir Studi Revitalisasi Otonomi Desa,* Jakarta, Lihat juga Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, Jogjakarta, 1953.

Didik Sukriono, 2010, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*, Malang : Setara Press.

Esmi Warassih, 2010, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hanif Nurcholis, 2001, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah,* Jakarta : *Erlangga*.

Hartoyo dkk, 1996, *Buku Materi Pokok Konsep Pembangunan Masyarakat Desa,* Jakarta : Karunika Universitas Terbuka.

James A Black Dean Champion, 1999, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama.

Kartini Kartono, 1976, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: Alumni Bandung.

Ki H.M Sudarmo, 2006, *Cerita Rakyat Puspanegara Pelopor Pejuang Rakyat Brebes,* Brebes: CV.Ar.rahman.

Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law : An Introduction, 2nd Edition,* terj. Wishnu Basuki, Hukum Amerika : Sebuah Pengantar, Jakarta: PT. Tatanusa.

Lincolin Arsyad, Dkk, 2011, *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal,* Yogyakarta: STIM YKPN.

M. mas’ud Said, 2005, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, Malang: UMM Press.

Mahendra Kurniawan, dkk, 2007, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta : Kreasi Total Media.

Maria Eni Surasih, 2006, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya,* Jakarta: Erlangga.

Maria Farida Indriati, 2014, *Ilmu Perundang-undangan,* Yogyakarta : PT Kanius.

Morris.L.Conen, 1995, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, terjemahan oleh Ibrahim R, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

N. I. Beratha, 1999, *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa,* Jakarta : Ghalia Indonesia.

N Daldjoeni dan A Suyitno, 1986, *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan,* Bandung: Alumni.

Nurmayani, 2009, *Hukum Admistrasi Daerah,* Bandar Lampung: UNILA.

Oemar Senoadji, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum,* Erlangga.

Otang Rosandi & Andi Desmon, 2013, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum,* Yogyakarta : Thafa Media.

Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia,* Surabaya : PT Bina Ilmu.

Piliang, Indra J. Piliang, dkk (editor), 2003, *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi,* Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa.

Policybrief, 2015, *Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah,* Nomor 3/PKDO/2015, Jakarta.

R. Adisasmita, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan,* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Rudy, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah,* Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA.

Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Slamet Luwihono, 2005, *Renstra (RENSTRA): Instrumrn Menggapai Kesejahteraan Masyarakat di Era Transisi Otonomi Daerah,* dalam Majalah Terbuka, edisi Januari.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif* : *Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali.

Soimin, 2010, *Pembentukan Perundang-Undangan Negara Indonesia,* Yogyakarta : UII Pers Yogyakarta.

Sumaryadi,I Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : Citra Utama.

Stoner, James A.F, 2006, *Management*, Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, Inc

T. Ndraha, 1990, *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas,* Jakarta : Rineka Cipta.

Taliziduhu Ndraha, 2014, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa,* Jakarta : PT Bumi Aksara.

W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009, *Legislatif Drafting, Teori dan Teknik, Pembuatan Peraturan Daerah,* Yogyakarta : Universitas Atmajaya.

Wily D.S. Voll, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara,* Jakarta : Sinar Grafika.

Zudan Arif Fakmulloh, 2010, *Ilmu Lembaga Negara dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

**Jurnal – Jurnal**

Antono Herry P.A, *Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,* Jurnal Ilmiah *Civis,* Volume V, No 1, Januari 2015.

Dilton Ribeiro, *Indigenous Right before the Inter-American Court of Human Right: a call for Pro Individual Interpretation,* Harvard Internasional Law Jurnal, Volume 55, Februari 2015.

Dwi Astuti, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,* journal IKIP Veteran Semarang, Vol. 2, No 1, November, 2014.

Gianluigi Palombella, *The rule of law beyond the state: Failures, promises, and theory, International Jurnal of Constitutional Law,* Volume 7, issue 3, 1 july 2009.

Nurliana, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara,* Jurnal Administrasi Negara Volume 1, Nomor 3, 2013 : 1059-1070, Universitas Mulawarman.

Retno Saraswati, *Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (IUS CONSTITUENDUM)*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 43 No.3, Juli 2014.

Richard C Allokendek, Marthen L. Kimbal, Gustaf Undap, *Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Infrastruktur Di Desa Darunu Kecamatan Wori,* <http://ejournal.unsrat.ac.id>.

Salon Salomon, *The Dynamic Law of Occupation: Inaugurating International Thematic Constitutional,* Harvard International Law Journal, Volume 54, Desember 2016.

Sutrisno Purwohadi Mulyono, *Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,* Masalah-Masalah Hukum, Jilid 43 No.3 Juli 2014.

**Website:**

Sumber dari https//:Brebes.go.id diakses pada tanggal 23 November 2017. Pukul :22.45 WIB.

1. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hal. 1-2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa,* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2014), Hal. 4. [↑](#footnote-ref-2)
3. Piliang, Indra J. Piliang, dkk (editor), *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi,* (Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2003), Hal. 11-13. [↑](#footnote-ref-3)
4. M. mas’ud Said, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2005), Hal. 54. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sutrisno Purwohadi Mulyono, *Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,* Masalah-Masalah Hukum, Jilid 43 No.3 Juli 2014. [↑](#footnote-ref-5)
6. Slamet Luwihono, *Renstra (RENSTRA): Instrumrn Menggapai Kesejahteraan Masyarakat di Era Transisi Otonomi Daerah,* dalam Majalah Terbuka, edisi Januari 2005, Hal. 13. [↑](#footnote-ref-6)
7. Retno Saraswati, *Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (IUS CONSTITUENDUM)*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 43 No.3, Juli 2014. [↑](#footnote-ref-7)
8. Abdul Wahab Solichin, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik,* (Malang : Universitas Muhamadiyah Malang,2008), Hal. 68. [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdul Wahab Solichin, *Ibid,* Hal. 65. [↑](#footnote-ref-9)
10. Abdul Wahab Solichin, *Ibid,* Hal. 3. [↑](#footnote-ref-10)
11. Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*, (Malang : Setara Press, 2010), Hal. 58. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Laporan Akhir Studi Revitalisasi Otonomi Desa,* Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa, Jakarta, 2007, Hal. 47-48. Lihat juga Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, Jogjakarta, 1953, Hal. 4. [↑](#footnote-ref-12)
13. Clifford Geertz, Negara, *The Theater State in Nineteeth – Century Bali,* yang diterjemahkan sebagai *Negara Teater, Kerajaan-kerajaan di Bali Abad Kesembilan Belas,* Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 2000, dalam Suhartono, Politik Lokal, Lepara Pustaka Umum, Yogyakarta, 2000, Hal. 10. [↑](#footnote-ref-13)
14. Bambang Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa,* (Bandung : Fokusmedia,2011), Hal. 133. [↑](#footnote-ref-14)
15. Bambang Soemantri, *Ibid,* Hal. 135. [↑](#footnote-ref-15)
16. Bryant Coralie dan White Louise, *Manajemen Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1998), Hal. 34. [↑](#footnote-ref-16)
17. Nurliana, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara,* Jurnal Administrasi Negara Volume 1, Nomor 3, 2013 : 1059-1070, Universitas Mulawarman. [↑](#footnote-ref-17)
18. Deddy Supriady Brata Kusumah, dan Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah,* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2005). [↑](#footnote-ref-18)
19. Bintoro Tjokroamidjojo, *Tujuan Pembangunan Nasional Menggerakan, Menguatkan Potensi Kreativitas,* 1986, Hal. 22. [↑](#footnote-ref-19)
20. Richard C Allokendek, Marthen L. Kimbal, Gustaf Undap, *Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Infrastruktur Di Desa Darunu Kecamatan Wori,* <http://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017 Pukul 21.00 Wib. [↑](#footnote-ref-20)
21. Gianluigi Palombella, *The rule of law beyond the state: Failures, promises, and theory,* *International Jurnal of Constitutional Law,* Volume 7, Issue 3, 1 July 2009, Hal. 442. [↑](#footnote-ref-21)
22. Dilton Ribeiro, *Indigenous Rights before the Inter-American Court of Human Rights: a Call for a Pro Individual Interpretation,* Harvard Internasional Law Journal, Volume 55, Februari 2015, Hal. 4. [↑](#footnote-ref-22)
23. Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia,* (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987), Hal. 84. [↑](#footnote-ref-23)
24. Philipus M.Hadjon, *Ibid,* Hal. 85. [↑](#footnote-ref-24)
25. Philipus M.Hadjon, *Ibid,* Hal. 91. [↑](#footnote-ref-25)
26. Oemar Senoadji, *Peradilan Bebas Negara Hukum,* (Erlangga, 1980),Hal. 35. [↑](#footnote-ref-26)
27. Azhari, *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini),* (Prenada, 2010), Hal. 94. [↑](#footnote-ref-27)
28. A.Muhammad Nasrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung,* (ELSAM, 2004) Hal. 51. [↑](#footnote-ref-28)
29. A.Muhammad Nasrun, *Ibid,* Hal. 52. [↑](#footnote-ref-29)
30. A.Muhammad Nasrun, *Ibid,* Hal. 53. [↑](#footnote-ref-30)
31. Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2007), Hal. 5. [↑](#footnote-ref-31)
32. Maria Farida Indriati. *Ilmu Peerundang-Undangan*, (Yogyakarta : PT Kanius, 2014), Hal. 10. [↑](#footnote-ref-32)
33. Solon Solomon, *The Dynamic Law of Occupation: Inaugurating International Thematic Constitutionalism*, Harvard Internasional Law Journal, Volume 54, Desember 2016 , Hal. 59. [↑](#footnote-ref-33)
34. B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2008), Hal. 118. [↑](#footnote-ref-34)
35. W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, *Legislatif Drafting, Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*,(Yogyakarta:Universitas Atmajaya, 2009), Hal. 25. [↑](#footnote-ref-35)
36. Zudan Arif Fakmulloh, Ilmu Lembaga Negara dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), Hal. 131-133. [↑](#footnote-ref-36)
37. Otong Rosandi & Andi Desmon, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2013), Hal. 95. [↑](#footnote-ref-37)
38. Zudan Arif, *Opcit*, Hal. 135. [↑](#footnote-ref-38)
39. Soimin, *Pembentukan Perundang-Undangan Negara Indonesia*, (Yogyakarta : UII Pers Yogyakarta, 2010), Hal. 32. [↑](#footnote-ref-39)
40. Soimin, *Ibid*, Hal. 32. [↑](#footnote-ref-40)
41. Soimin, *Ibid*, Hal. 33. [↑](#footnote-ref-41)
42. Wily D.S. Voll, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Adminstrasi Negara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Hal. 29-32. [↑](#footnote-ref-42)
43. Soimin, *Opcit*, Hal. 33. [↑](#footnote-ref-43)
44. Soimin, *Opcit*, Hal. 33. [↑](#footnote-ref-44)
45. Soimin, *Opcit*, Hal. 33. [↑](#footnote-ref-45)
46. Soimin, *Opcit*, Hal. 33. [↑](#footnote-ref-46)
47. Satjipto Rahardjo, *Sisi lain Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Buku Kompas, 2006) Hal. 130. [↑](#footnote-ref-47)
48. Lawrence M. Friedman, *American Law : An Introduction, 2nd Edition,* terj. Wishnu Basuki, Hukum Amerika : Sebuah Pengantar (Jakarta: PT. Tatanusa, 2001), Hal. 3. [↑](#footnote-ref-48)
49. Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), Hal. 27. [↑](#footnote-ref-49)
50. Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Alumni Bandung, 1976), Hal. 15. [↑](#footnote-ref-50)
51. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia,1986), Hal. 7. [↑](#footnote-ref-51)
52. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* : *Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Rajawali, 1985), Hal. 3. [↑](#footnote-ref-52)
53. Kartini Kartono, *Op.cit*, Hal. 10. [↑](#footnote-ref-53)
54. James A Black Dean Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 1999), Hal. 3. [↑](#footnote-ref-54)
55. Morris.L.Conen, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, terjemahan oleh Ibrahim R, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,1995), Hal. 1. [↑](#footnote-ref-55)
56. Moris L.Conen, *Ibid*, Hal. 3-4. [↑](#footnote-ref-56)
57. Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Op.cit*, Hal. 35. [↑](#footnote-ref-57)
58. Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya,2001), Hal. 103-104. [↑](#footnote-ref-58)
59. Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah, (*Jakarta:*Erlangga*, 2001), Hal. 4. [↑](#footnote-ref-59)
60. Hanif Nurcholis, *Ibid.* [↑](#footnote-ref-60)
61. Hanif Nurcholis, *Ibid.* [↑](#footnote-ref-61)
62. Hanif Nurcholis, *Ibid.* [↑](#footnote-ref-62)
63. Lincolin Arsyad, Dkk, *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal,* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2011), Hal. 65. [↑](#footnote-ref-63)
64. Lincolin Arsyad, *Ibid,* Hal. 90. [↑](#footnote-ref-64)
65. Nurmayani, *Hukum Admistrasi Daerah,* (Bandar Lampung: UNILA, 2009), Hal. 2-3. [↑](#footnote-ref-65)
66. Maria Eni Surasih, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya,* (Jakarta: Erlangga, 2006), Hal. 23. [↑](#footnote-ref-66)
67. Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah,* (Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013), Hal. 86. [↑](#footnote-ref-67)
68. Antono Herry P.A, *Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,* Jurnal Ilmiah *Civis,* Volume V, No 1, Januari 2015,Hal. 737. [↑](#footnote-ref-68)
69. Antono Herry P.A, *Ibid,* Hal. 738. [↑](#footnote-ref-69)
70. Dwi Astuti, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,* journal IKIP Veteran Semarang, Vol. 2, No 1, November, 2014, Hal. 36. [↑](#footnote-ref-70)
71. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa. [↑](#footnote-ref-71)
72. Pasal 4 yang dimaksud dengan program yang berbasis adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannnya. [↑](#footnote-ref-72)
73. Stoner, James A.F, *Management*, (Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, Inc, 2006), Hal. 43. [↑](#footnote-ref-73)
74. Arif, Muhammad, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, (Pekanbaru: ReD Post Press, 2007), Hal. 32. [↑](#footnote-ref-74)
75. Sumaryadi,I Nyoman,Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta : Citra Utama, 2005), Hal. 24. [↑](#footnote-ref-75)
76. Hanif, Nurcholis, Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011), Hal. 82. [↑](#footnote-ref-76)
77. Hartoyo dkk, *Buku Materi Pokok Konsep Pembangunan Masyarakat Desa,* (Jakarta : Karunika Universitas Terbuka), 1996, Hal. 6. [↑](#footnote-ref-77)
78. N. I. Beratha, *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa,* (Jakarta : Ghalia Indonesia), 1999, Hal. 7. [↑](#footnote-ref-78)
79. R. Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan,* (Yogyakarta : Graha Ilmu), 2006, Hal. 18-20. [↑](#footnote-ref-79)
80. T. Ndraha, *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas,* (Jakarta : Rineka Cipta), 1990, Hal. 71. [↑](#footnote-ref-80)
81. T.Ndraha, *Ibid,* Hal. 72. [↑](#footnote-ref-81)
82. T.Ndraha, *Ibid,* Hal. 70. [↑](#footnote-ref-82)
83. Ki H.M Sudarmo, *Cerita Rakyat Puspanegara Pelopor Pejuang Rakyat Brebes,*(Brebes: CV.Ar.rahman, 2006), Hal. 4. [↑](#footnote-ref-83)
84. Sumber dari https//:Brebes.go.id diakses pada tanggal 23 November 2017. Pukul :22.45 WIB. [↑](#footnote-ref-84)
85. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-85)
86. N Daldjoeni dan A Suyitno, *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan,* (Bandung: Alumni, 1986). [↑](#footnote-ref-86)
87. Eta Yuli Lestari, Natal Kristiono, dan Aulia Sholichah, *Implementasi Undang-Undang No 6 Tentang Desa Di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus,* Jurnal Integalistik No.2/Th.XXVI/2015, Juli-Desember 2015. [↑](#footnote-ref-87)
88. Policybrief, *Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah,* Nomor 3/PKDO/2015, Jakarta, Hal. 4. [↑](#footnote-ref-88)